

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN  
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)  
DI KELURAHAN MARUNDA JAKARTA UTARA**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota

Oleh:

**S U T A M I**  
L4D007038



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN  
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)  
DI KELURAHAN MARUNDA JAKARTA UTARA**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**S U T A M I**  
**L4D007038**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 24 Maret 2009

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Maret 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Ir. Sunarti, MT**

**Wido Prananing Tyas, ST, MDP**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

**DR.Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, Maret 2009

**SUTAMI**  
**NIM L4D007038**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan jalan dan kemudahan bagi penyelesaian tesis ini, sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, dengan konsentrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.

Adapun judul/tema yang dipilih dalam penyusunan tesis ini adalah "*Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara.*"

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini telah mendapatkan banyak kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. DR.Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc, sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro;
2. Ir. Sunarti, MT sebagai pembimbing utama;
3. Wido Prananing Tyas, ST, MDP sebagai pembimbing pendamping;
4. DR.Ing. Asnawi Manaf, MT, sebagai penguji;
5. Ir. Rina Kurniati, MT, sebagai penguji;
6. Pemda DKI Jakarta yang telah memberikan berbagai macam kemudahan mulai dari seleksi tugas belajar, pelaksanaan kuliah, pelaksanaan penelitian hingga penyusunan tesis ini;
7. Teman-teman kelas PU sebagai teman dalam diskusi, dan
8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas semua bantuannya dalam setiap proses penyusunan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga sangat diharapkan adanya saran, kritik dan masukan dari para dosen/pembimbing serta pembaca bagi perbaikan selanjutnya, penyusunan tesis.

Semarang, Maret 2009

Penulis

## ABSTRAK

Pertumbuhan kota yang cepat secara langsung berdampak pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang tentunya memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Hal ini menuntut pemerintah kota untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dalam pembiayaan pembangunan, karena keterbatasan pemerintah kota dalam menyediakan dana pembangunan, termasuk menetapkan sektor-sektor yang dapat diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat sebagai bentuk partisipasi. PPMK sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan perkotaan membawa konsep yang berbeda dengan program sebelumnya, yaitu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada aspek partisipasi dan kemandirian sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan dalam 3 aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial dan fisik lingkungan (Tridaya).

Penelitian ini bertujuan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan, dan metode analisis kuantitatif, untuk menganalisis pengaruh hubungan sosial ekonomi masyarakat dengan bentuk partisipasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya antusiasme keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan dalam berbagai bentuk. Keikutsertaan responden pada setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa responden sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai pengagas adanya program PPMK. Indikasi adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat **kemitraan (partnership)**, sedang keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara berada pada **tingkat therapy**.

Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah pelibatan seluruh masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan tanpa memandang perbedaan kondisi sosial ekonomi, dan peningkatan intensitas sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) oleh pemerintah agar program ini berada pada tingkat kemitraan (partnership), dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, PPMK, prasarana lingkungan

## ABSTRACT

*Growth of town that is quickly directly affects at development of elementary infrastructure and service of public that is it is of course requires a real big defrayal. This thing claims government of town to do efesiensi and effectivity in development defrayal, because limitation of government of town in providing development fund. Including specifying sectors which can be delivered its the management to public as a form of participation. PPMK as one of program penanggulangan poorness of urban brings concept differing from program before all, be through enableness approach of public emphasizing at participation aspect and independence causing is reached sustainable development in 3 life aspect that is economics, social and physical of area (Tree power).*

*This research aim to study participation of public in development of environmental infrastructure passed Enableness Program Sub-district Public (PPMK), with qualitative descriptive analytical method to analyse form and level of partisipasi public at development of area infrastructure, and quantitative analytical method, to analyse influence the relation of public economics social with form of participation.*

*Result of research shows existence of antusiasme involvement of public in every development step of environmental infrastructure in so many form. Responder taking part in in each development step of indicating that environmental infrastructure is responder has done good cooperation with government as concepthor existence of program PPMK. Indication existence of this cooperation, indicates that form of participation of public has resided in at partnership level, medium of existence Enableness Program Sub-district Public (PPMK) in sub-district Marunda North Jakarta stays at level therapy.*

*Recommendation given in this research is entangling of all public in development of environmental infrastructure without reference to difference of condition of economics social, and improvement of socialization intensity Enableness Sub-district Public (PPMK) by government that this program stays at partnership level, where at this level participation of public haves the power of negotiation with power owner in doing planning, execution, observation and evaluation.*

*Keyword: Participation of Public, PPMK, area infrastructure*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Sasaran Penelitian .....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial .....	8
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial .....	9
1.5 Kerangka Pemikiran .....	13
1.6 Metodologi Penelitian .....	15
1.6.1 Pendekatan Penelitian .....	15
1.6.2 Tahap Penelitian .....	15
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	16
1.7 Kebutuhan Data .....	16
1.8 Teknik Pengambilan Sampel .....	20
1.9 Metode Analisis .....	21
1.10 Teknis Analisis .....	22
1.11 Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II    PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN</b> .....	28
2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat .....	28
2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat .....	31
2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat .....	32
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat .....	38
2.5 Pembangunan Prasarana dan Sarana .....	40
2.6 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Prasarana .....	43
2.7 Resume Kajian Pustaka .....	45
<b>BAB III    GAMBARAN UMUM KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING KOTAMADYA JAKARTA UTARA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)</b> .....	49
3.1 Letak Geografis .....	49
3.2 Kondisi Fisik .....	50

3.3 Kependudukan .....	50
3.4 Kondisi Sarana Lingkungan.....	53
3.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) .....	56

<b>BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) DI KELURAHAN MARUNDA JAKARTA UTARA .....</b>	<b>71</b>
4.1 Analisis Kualitas dan Kuantitas Prasarana Lingkungan yang Dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara.....	71
4.1.1 Jalan Lingkungan.....	72
4.1.2 Saluran Air Limbah Rumah Tangga.....	77
4.1.3 Tempat Pembuangan Sampah.....	79
4.1.4 Jembatan .....	81
4.2 Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	83
4.2.1 Jenis Kelamin.....	83
4.2.2 Usia .....	84
4.2.3 Pendidikan.....	85
4.2.4 Pekerjaan.....	86
4.2.5 Penghasilan .....	87
4.3 Analisis Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) .....	89
4.3.1 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan .....	89
4.3.2 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan.....	94
4.3.3 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pengawasan.....	98
4.3.4 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK).....	100
4.4 Analisis Hubungan Sosial Ekonomi Terhadap Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) .....	103
4.4.1 Perbandingan Jenis Kelamin Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	103
4.4.2 Perbandingan Usia Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	105
4.4.3 Perbandingan Tingkat Pendidikan Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	106
4.4.4 Perbandingan Pekerjaan Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	107
4.4.5 Perbandingan Penghasilan Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	109
4.4.6 Analisis Hubungan Sosial Ekonomi terhadap Bentuk Partisipasi Masyarakat pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan Prasarana Lingkungan .....	111
4.5 Analisis Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan	

Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).....	113
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>119</b>
5.1 Kesimpulan... ..	119
5.2 Rekomendasi.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>126</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN A : Kuesioner .....	126
LAMPIRAN B : Kode Jenis Variabel .....	134
LAMPIRAN C : Rekapitulasi Kondisi Sosial Ekonomi, Keaktifan, Bentuk dan Tingkat Partisipasi Responden Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda .....	136
LAMPIRAN D : Variabel View Kondisi Sosial Ekonomi, Bentuk dan Tingkat Partisipasi Responden.....	140
LAMPIRAN E : Hasil Analisis SPSS ( <i>crosstab dan chi-square tests</i> ) Bentuk Partisipasi dengan Kondisi Sosial Ekonomi Responden pada Perencanaan Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	142
LAMPIRAN F : Hasil Analisis SPSS ( <i>crosstab dan chi-square tests</i> ) Bentuk Partisipasi dengan Kondisi Sosial Ekonomi Responden pada Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	145
LAMPIRAN G : Hasil Analisis SPSS ( <i>crosstab dan chi-square tests</i> ) Bentuk Partisipasi dengan Kondisi Sosial Ekonomi Responden pada Pengawasan Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	149

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 : Peta Administrasi Kotamadya Jakarta Utara .....	10
GAMBAR 1.2 : Peta Administrasi Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara .....	11
GAMBAR 1.3 : Peta Administrasi Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara .....	12
GAMBAR 1.4 : Kerangka Pemikiran .....	14
GAMBAR 1.5 : Kerangka Analisis .....	25
GAMBAR 3.1 : Struktur Organisasi Pelaksanaan PPMK di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .....	67
GAMBAR 4.1 : Peta Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan di Kelurahan Marunda .....	73
GAMBAR 4.2 : Peta Kondisi Saluran Air Limbah di Kelurahan Marunda .....	78
GAMBAR 4.3 : Peta Kondisi Tempat Pembuangan Sampah di Kelurahan Marunda .....	80
GAMBAR 4.4 : Peta Kondisi Jembatan di Kelurahan Marunda.....	82
GAMBAR 4.5 : Peta Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Marunda .....	93
GAMBAR 4.6 : Peta Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Marunda .....	97

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Kebutuhan Data .....	18
TABEL I.2	: Sebaran Responden.....	21
TABEL II.1	: Resume Kajian Pustaka .....	46
TABEL III.1	: Persentase Penggunaan Tanah di Kelurahan Marunda, 2006 .....	50
TABEL III.2	: Luas Wilayah, Jumlah KK, Penduduk, Kepadatan Penduduk, RT,RW, di Kelurahan Marunda, 2006.....	51
TABEL III.3	: Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Marunda, 2006 .....	51
TABEL III.4	: Jumlah Rumah Penduduk/Bangunan Tempat Tinggal Menurut Keadaan Fisik Bangunan di Kelurahan Marunda, 2006.....	52
TABEL III.5	: Jumlah KK yang Bertempat Tinggal di Lokasi yang Tidak Diinginkan, di Kelurahan Marunda, 2006.....	52
TABEL III.6	: Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Marunda, 2006 .....	53
TABEL III.7	: Tempat Ibadah di Kelurahan Marunda, 2006 .....	53
TABEL III.8	: Sarana Pendidikan di Kelurahan Marunda, 2006 .....	54
TABEL III.9	: Industri Menurut Jenisnya di Kelurahan Marunda, 2006 .....	54
TABEL III.10	: Jumlah Pasar Menurut Jenisnya di Kelurahan Marunda, 2006 .....	55
TABEL III.11	: Banyaknya Fasilitas Komunikasi di Kelurahan Marunda, 2006 .....	55
TABEL III.12	: Jenis Prasarana Lingkungan yang Dibangun di Kelurahan Marunda Melalui Dana PPMK Tahun 2004, 2005, 2006 .....	70
TABEL IV.1	: Frekuensi Jenis Kelamin Responden pada Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	83
TABEL IV.2	: Frekuensi Usia Responden pada Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	84
TABEL IV.3	: Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden pada Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	85
TABEL IV.4	: Frekuensi Jenis Pekerjaan Responden pada Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	87
TABEL IV.5	: Frekuensi Penghasilan Responden pada Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	88
TABEL IV.6	: Keikutsertaan Masyarakat Berpartisipasi pada Tahap Perencanaan Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	89
TABEL IV.7	: Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	90
TABEL IV.8	: Keikutsertaan Masyarakat Berpartisipasi pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	94
TABEL IV.9	: Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	96
TABEL IV.10	: Keikutsertaan Masyarakat Berpartisipasi pada Tahap Pengawasan Pembangunan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Marunda.....	98

TABEL IV.11	: Bentuk Partisipasi Responden pada Tahap Pengawasan Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	99
TABEL IV.12	: Pendapat Responden tentang Keikutsertaan Mereka Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan .....	102
TABEL IV.13	: Perbandingan Jenis Kelamin Responden dengan Bentuk Partisipasi pada Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	104
TABEL IV.14	: Perbandingan Usia Responden dengan Bentuk Partisipasi pada Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	105
TABEL IV.15	: Perbandingan Tingkat Pendidikan Responden dengan Bentuk Partisipasi pada Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	106
TABEL IV.16	: Perbandingan Pekerjaan Responden dengan Bentuk Partisipasi pada Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	108
TABEL IV.17	: Perbandingan Penghasilan Responden dengan Bentuk Partisipasi pada Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	110
TABEL IV.21	: Hubungan Bentuk Partisipasi Responden dengan Kondisi Ekonomi pada Tahapan Pembangunan Prasarana Lingkungan .....	111

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi (Jayadinata,1999:31), dan dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan.

Pemerintah tidak mungkin akan mampu membiayai sepenuhnya pembangunan prasarana. Dalam arti peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana secara langsung semakin lama harus semakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga dapat merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Dalam hal ini penekanan dalam hal kemandirian (*selfhelp*), maksudnya ialah masyarakat itu yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga (Slamet,1994:6).

Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat,1999:223).

<sup>1</sup> Berdasarkan model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek

tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat.

Penguatan kelembagaan di sini tidak hanya berarti penguatan secara fisik saja, seperti bangunan, struktur, atau hanya kelengkapan organisasi, tetapi lebih kepada penguatan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang disertai tugas dan wewenang melaksanakan, memantau, atau menjaga program pembangunan di wilayahnya (Sumodiningrat,1999:223). Dengan menguatnya kelembagaan masyarakat setempat terutama berkaitan dengan fungsi dan peran sebagai lembaga masyarakat yang diterima dan dipercaya oleh warga masyarakatnya, jika program pembangunan diserahkan pelaksanaannya kepada lembaga tersebut, maka partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut dapat dijamin tergolong tinggi. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. Namun diperlukan kemampuan pemerintah untuk menetapkan sektor-sektor yang dapat diserahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada masyarakat, serta bantuan perangsang yang harus diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu untuk menumbuhkembangkan partisipasi dalam pembangunan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, perlu dipikirkan tipe-tipe fasilitas tertentu yang bukan saja mampu meningkatkan partisipasi itu sendiri tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat (Sukarjo,2006: 2).

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ibukota. Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. PPMK merupakan sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat, mencakup seluruh aspek kehidupan dan

penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik, melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan dengan menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat. Pada program ini bantuan diberikan untuk pembinaan di tiga aspek kehidupan masyarakat atau Program Tribina, yaitu Bina Sosial, Bina Sosial Ekonomi, dan Bina fisik Lingkungan.

PPMK dilaksanakan mulai tahun 2001 dan masih berupa "*pilot project*" untuk 50 kelurahan yang tersebar di 5 kotamadya. Pada tahun berikutnya diberikan pada 217 kelurahan dan sejak tahun 2003, PPMK diberikan kepada seluruh kelurahan di DKI Jakarta. Beragam jenis kegiatan telah dilakukan melalui Program Bina Sosial PPMK, antara lain penguatan kelembagaan dan pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial. Untuk program bina ekonomi dititikberatkan pada kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Kegiatan Bina Fisik lingkungan antara lain meliputi pembangunan jalan dan jembatan, sanitasi dan penyediaan sarana kebersihan. Di samping penyaluran dana PPMK, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan pelaksanaan PPMK sepanjang tahun 2002-2007. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penilaian kegiatan Bina fisik Lingkungan, yang terkait dengan keberadaan RW Kumuh di Jakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa jumlah RW yang tergolong kumuh di DKI Jakarta masih tinggi. Dari 699 RW Kumuh yang disurvei hasilnya adalah 20 RW berkategori kumuh berat, 243 RW berkategori kumuh sedang, 159 berkategori kumuh ringan, 218 RW berkategori kumuh sangat ringan dan 59 RW berkategori tidak kumuh. Penilaian tersebut antara lain didasarkan pada persentase lahan yang sudah didirikan bangunan, persentase jalan aspal/pengerasan permanen, waktu maksimal untuk saluran air tergenang, persentase penduduk yang menggunakan air bersih untuk sumber air minum, persentase penduduk yang membuang tinja ke kali, dan persentase sampah diangkut petugas dalam seminggu (Evaluasi RW Kumuh DKI Jakarta, 2004).

Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara adalah termasuk salah satu kelurahan yang termasuk dalam Evaluasi Rukun Warga Kumuh tersebut, dan Kelurahan

Marunda adalah merupakan kelurahan dengan jumlah RT yang kumuh tertinggi dari seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Cilincing. Selain kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan peningkatan permukiman kumuh, berbagai penyebab sehingga kawasan ini tetap menjadi kumuh, antara lain adalah termasuk perkampungan nelayan dengan jumlah penduduk yang besar serta banyaknya bangunan semi permanen yang bermunculan, banjir yang setiap musim penghujan selalu melanda kawasan ini. Juga disebabkan oleh adanya rob yang sudah merupakan hal biasa yang terjadi sejak dulu, namun keadaannya semakin parah sejak adanya pembangunan rusun tahun 2004, kawasan ini terus digenangi air pasang (Pelita, 31 Maret 2008).

Mencermati proses dan hasil evaluasi dalam kegiatan PPMK ini, peran partisipasi masyarakat yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Menumbuhkan respon akan kesadaran berpartisipasi dalam perencanaan adalah sebuah kesulitan tersendiri. Kebanyakan masyarakat belum siap untuk berinisiatif dalam membuat perumusan kebutuhan serta perencanaan sendiri, sehingga perumusan kebutuhan dan perencanaan dibuat oleh kelompok atau warga masyarakat yang mempunyai pengaruh di lingkungannya, dan memungkinkan masuknya kepentingan tertentu. Ditambah lagi dengan pelaksanaan kegiatan fisik ini lebih difokuskan pada hasil daripada prosesnya, serta sumber dananya berupa hibah yang menyebabkan masyarakat merasa apatis dengan kegiatan ini.

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang seharusnya melibatkan seluruh warga masyarakat, sering terjadi hal yang sebaliknya, yaitu timbulnya rasa enggan dari warga karena mereka merasa bahwa kegiatan itu hanya akan memberikan manfaat bagi kelompok tertentu. Hasilnya adalah prasarana lingkungan yang telah selesai dibangun pada akhirnya kurang memuaskan disebabkan tidak sesuai dengan keinginan warga sehingga manfaatnya kurang begitu terasa secara langsung oleh semua masyarakat. Peran pengawasan yang diharapkan timbul dengan sendirinya karena perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat sendiripun tampaknya masih jauh dari harapan, karena adanya anggapan bahwa yang bertugas melakukan pengawasan adalah pihak pemerintah atau panitia

pelaksana yang telah dibentuk. Sehingga ada kecenderungan masyarakat untuk tidak melakukan pengawasan (Sukarjo,2006: 3).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah yang dapat dikemukakan adalah:

1. Masyarakat banyak yang belum mengetahui perencanaan pembangunan prasarana lingkungan;
2. Masyarakat belum seluruhnya terlibat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan;
3. Masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan.
4. Adanya sikap masyarakat yang apatis terhadap program pemerintah dengan sumber dana hibah dalam program pembangunan prasarana lingkungan.

Dari rumusan masalah tersebut, maka *Research Question* pada penelitian ini adalah *Bagaimana kajian partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara.*

## **1.3 Tujuan Dan Sasaran Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara.

### **1.3.2 Sasaran Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas maka sasaran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi dan jumlah prasarana lingkungan yang telah dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK);

2. Mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan;
3. Mengidentifikasi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK);
4. Menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK);
5. Menganalisis hubungan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK);
6. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansial**

Penelitian ini membahas kajian partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara, yang meliputi *pembangunan jalan lingkungan, jembatan, sanitasi (saluran air limbah) serta penyediaan sarana kebersihan (tempat pembuangan sampah sementara)*.

Adapun substansi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: *kondisi prasarana lingkungan yang telah dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara*. Pada bagian ini akan dijelaskan kualitas dan kuantitas setiap jenis prasarana lingkungan yang telah dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK); *kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Marunda Jakarta Utara*. Pada bagian ini akan dijelaskan kondisi sosial ekonomi (usia, jenis kelamin,

pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan) masyarakat Kelurahan Marunda; *bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara*. Pada tahap perencanaan hanya akan dijelaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk keaktifan warga mengikuti pertemuan, menyampaikan usulan/saran, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan; pada tahap pelaksanaan hanya akan dijelaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, material, pikiran dan keahlian; pada tahap pengawasan hanya akan dibahas partisipasi masyarakat dalam bentuk segi daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembangunan prasarana secara menyeluruh dan kesesuaian pembangunan prasarana di lapangan dengan rencana yang ditetapkan. Untuk tingkat partisipasi masyarakat akan dijelaskan berdasarkan Sherry Arnstein dengan delapan tangga tingkat partisipasi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Spasial**

Ruang lingkup spasial penelitian ini dibatasi pada Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara, seperti terlihat pada gambar berikut:



 <b>MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA</b> <b>PROGRAM PASCA SARJANA</b> <b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b> <b>SEMARANG</b>	<b>PETA</b> <b>ADMINISTRASI KODYA JAKARTA UTARA</b>	 <b>Gambar 1.1</b>																
<b>TESIS</b>  <b>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b> <b>PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI</b> <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)</b> <b>DI KELURAHAN MARUNDA KODYA JAKARTA UTARA</b>	<p style="text-align: center;"><b>Legenda</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Batas Propinsi</td> <td></td> <td>Jalan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kota</td> <td></td> <td>Rel Kereta Api</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kecamatan</td> <td></td> <td>Kec. Cilincing sebagai Kecamatan wilayah studi Kel. Marunda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Garis Pantai</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Batas Propinsi		Jalan		Batas Kota		Rel Kereta Api		Batas Kecamatan		Kec. Cilincing sebagai Kecamatan wilayah studi Kel. Marunda		Garis Pantai		
	Batas Propinsi		Jalan															
	Batas Kota		Rel Kereta Api															
	Batas Kecamatan		Kec. Cilincing sebagai Kecamatan wilayah studi Kel. Marunda															
	Garis Pantai																	



MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

**TESIS**

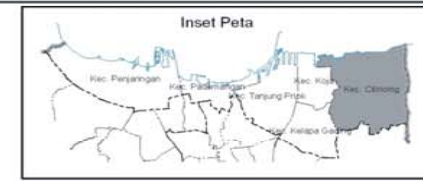
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)  
DI KELURAHAN MARUNDA KODYA JAKARTA UTARA

**PETA  
ADMINISTRASI KECAMATAN CILINCING  
KODYA JAKARTA UTARA**

**Legenda**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Batas Propinsi  | Jalan   |
| Batas Kota      | Sungai  |
| Batas Kecamatan | Kel. Marunda sebagai Wilayah Studi penelitian |
| Batas Kelurahan |   |
| Garis Pantai    |   |

**Inset Peta**



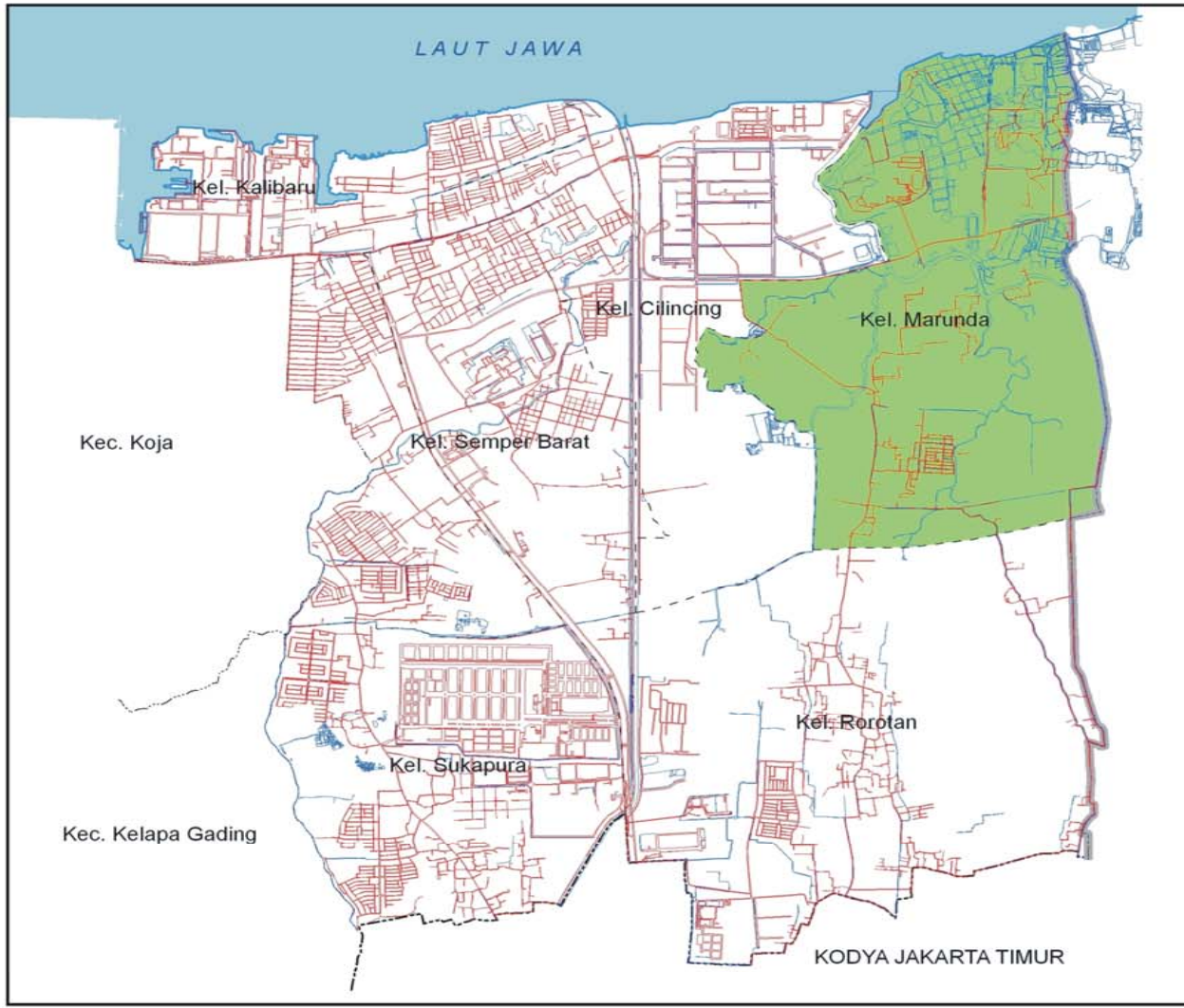
Gambar 1.2

**Skala Peta**



**Sumber Peta:**

Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dinas Pertanahan dan Pemetaan





MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

**TESIS**

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)  
DI KELURAHAN MARUNDA KODYA JAKARTA UTARA

**PETA  
ADMINISTRASI KELURAHAN MARUNDA  
KEC. CILINCING KODYA JAKARTA UTARA**

**Legenda**

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| Batas Propinsi  | Jalan    |
| Batas Kelurahan | Sungai   |
| Batas RW        | Bangunan |
| Garis Pantai    |          |

**Inset Peta**



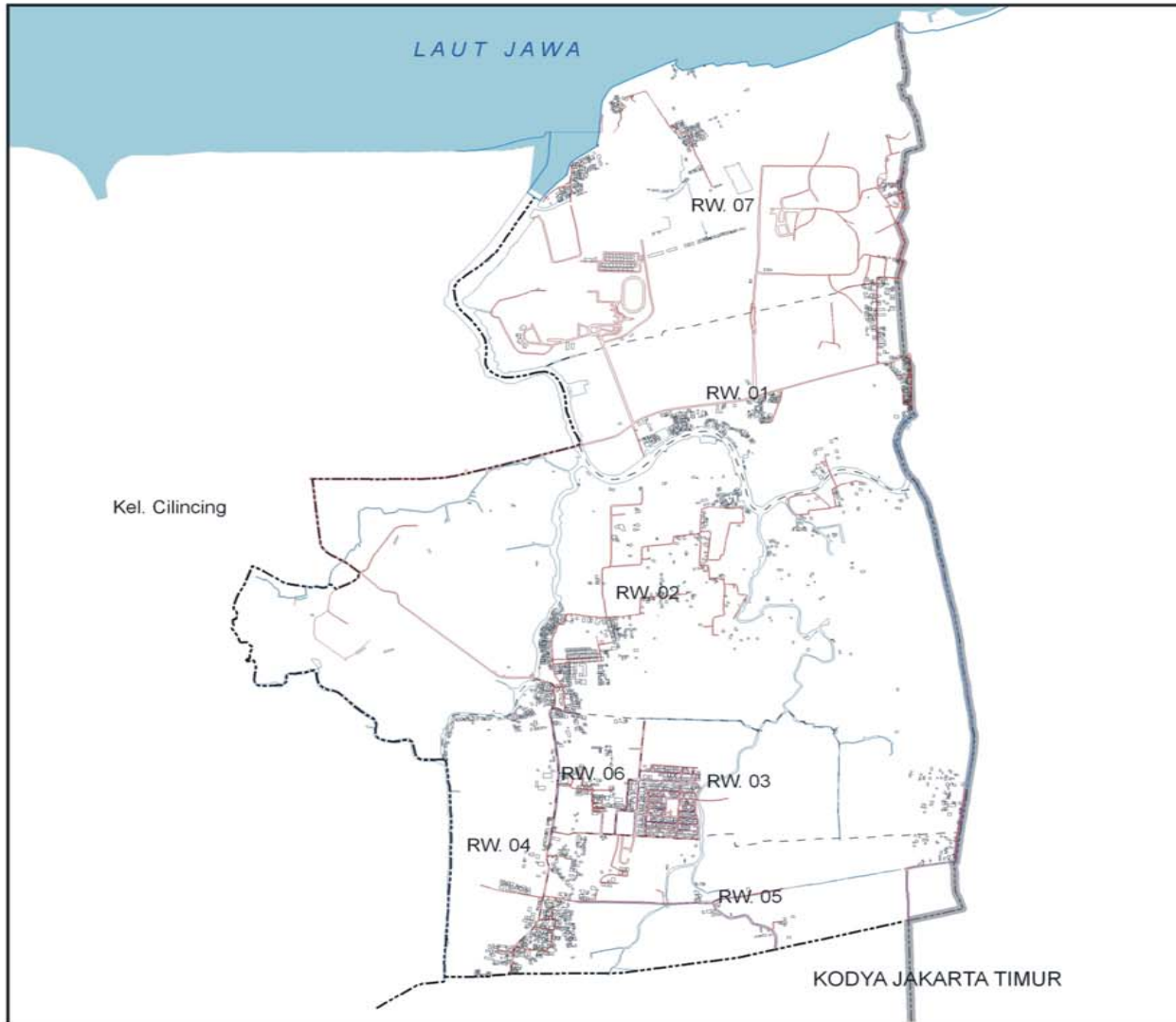
Gambar 1.3

**Skala Peta**



**Sumber Peta:**

Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dinas Pertanahan dan Pemetaan



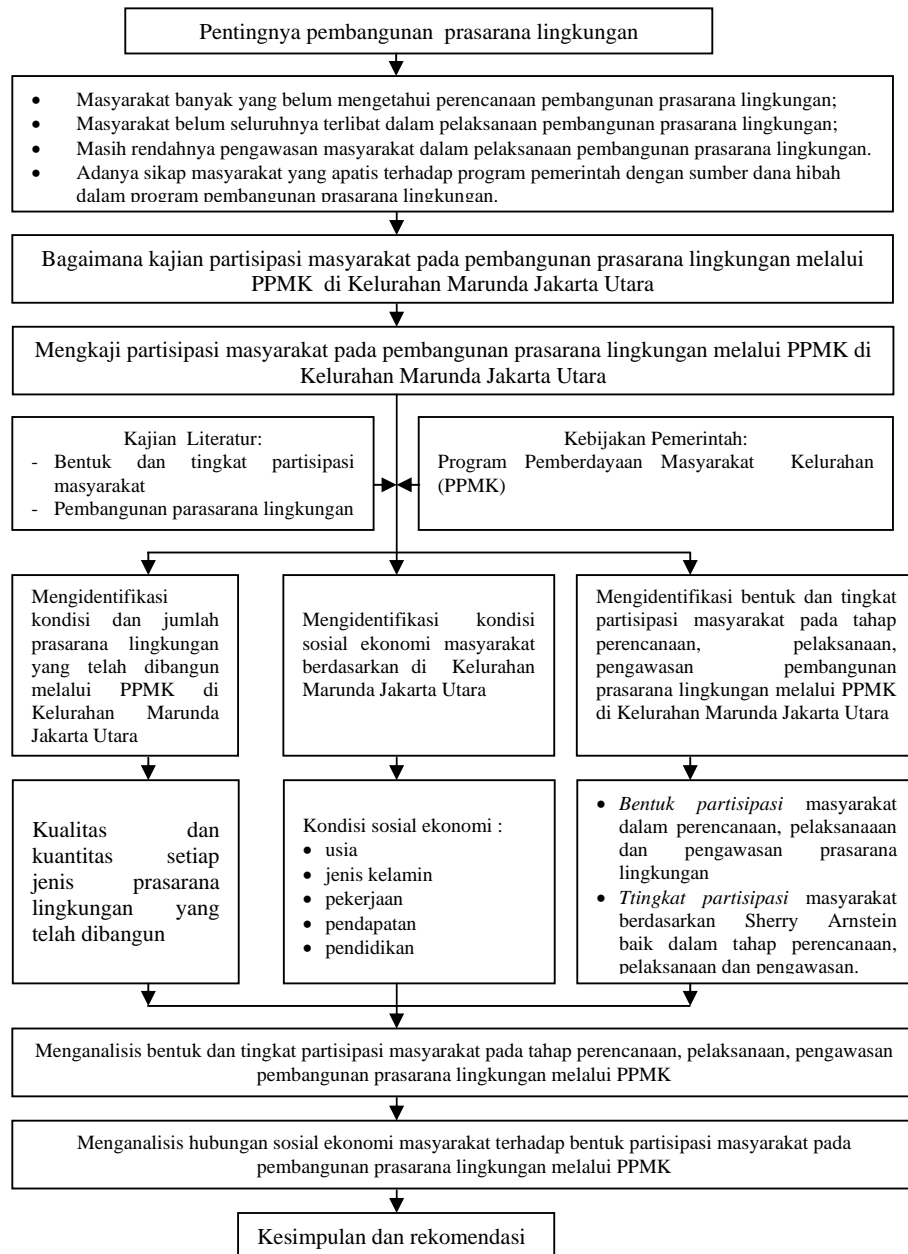
### 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam mewujudkan pembangunan alternatif, sudah saatnya melihat pentingnya masyarakat tidak lagi sebagai obyek tapi subyek pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat sudah sepenuhnya dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Karena selama ini keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya masyarakat cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Sehingga peran serta masyarakat "terbatas" pada implementasi atau penerapan program. Masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah di ambil pihak luar.

Kondisi tersebut yang melatarbelakangi tentang konsep partisipasi karena partisipasi sama dengan sebuah proyek atau program dalam pembangunan yang bersifat *top down* yang pada akhirnya tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat dan ujung-ujungnya pembangunan tersebut mengalami kegagalan.

Berdasarkan pengalaman diatas, maka perlu mengubah model pembangunan yaitu dengan menggunakan strategi pembangunan masyarakat (*bottom up*) dengan memprioritaskan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena pada dasarnya rakyat itu memiliki suatu sumber daya yang apabila diberdayakan akan muncul karena digali berdasarkan kebutuhan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk mereka sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari sebuah program dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan skematis atas

uraian kerangka pemikiran diatas akan diterangkan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2009

**GAMBAR 1.4**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*), untuk mengetahui permasalahan serta untuk mendapatkan informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan paradigma rasionalistik, yaitu mengedepankan pemikiran terlebih dahulu dalam bentuk konsep atau teori, sebagai landasan untuk menelaah gejala yang terjadi dan melakukan suatu tindakan. Penelitian ini juga akan ditunjang dengan data sekunder dan penelaan pustaka (*literature study*), terutama pada awal penyusunan kerangka pemikiran dan landasan teori.

### **1.6.2 Tahap Penelitian**

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Merumuskan latar belakang masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara;
2. Studi literature meliputi:
  - a. Teori- teori partisipasi masyarakat
  - b. Teori-teori permukiman
3. Pengumpulan data primer dan sekunder;
4. Analisis data kualitatif dan kuantitatif;
5. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang representative dan sejalan dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut (Slamet dalam <http://tesis-disertasi.blogspot.com/2008/04/studi-pustaka.html>, 6 April 2008):

1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup dengan pengertian tertutup bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternative yang telah disediakan.
2. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung melalui cara Tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang terpilih. Teknik ini digunakan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Beberapa hal yang belum tercakup dalam pertanyaan dapat digali dengan teknik ini.
3. Observasi, yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang akan diteliti, melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder, melalui studi pustaka/literatur dilengkapi dengan data statistik, peta, foto, dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan penelitian.

### 1.7 Kebutuhan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari pengisian kuesioner,

hasil wawancara, dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, dimana data sekunder ini diperoleh dari dokumentasi data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait.

Kebutuhan data selengkapnya yang diperlukan dalam penelitian ini seperti tercantum pada Tabel I.1.

**TABEL I.1  
KEBUTUHAN DATA**

NO.	SASARAN	VARIABEL	DATA	SUMBER DATA			
				PRIMER			SEKUNDER
				K	W	O	INSTANSI
1	Identifikasi kondisi prasarana lingkungan yang telah dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara	Prasarana Lingkungan	Kualitas dan kuantitas setiap jenis prasarana lingkungan yang telah dibangun:				
			• Jalan lingkungan	-	√	√	Kantor Lurah
			• Jembatan	-	√	√	Kantor Lurah
			• Sanitasi (saluran air limbah)	-	√	√	Kantor Lurah
2	Identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Marunda Jakarta Utara	Sosial ekonomi	▶ usia	√	-	-	-
			▶ jenis kelamin	√	-	-	-
			▶ pekerjaan	√	-	-	-
			▶ pendapatan	√	-	-	-
			▶ pendidikan	√	-	-	-
3	Identifikasi dan analisis bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara	Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan prasarana lingkungan	1. Keaktifan warga mengikuti pertemuan	√	-	-	-
			2. Menyampaikan usulan/saran	√	-	-	-
			3. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan.	√	-	-	-
		Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan	👤 tenaga	√	-	-	-
			💰 uang	√	-	-	-
			📦 material	√	-	-	-
			🧠 pikiran	√	-	-	-
			👤 keahlian	√	-	-	-
		Partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan pembangunan prasarana lingkungan	1. Daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan	√	-	-	-
			2. Kesesuaian bentuk prasarana di lapangan dengan rencana yang ditetapkan	√	-	-	-

NO.	SASARAN	VARIABEL	DATA	SUMBER DATA			
				PRIMER			SEKUNDER
				K	W	O	INSTANSI
4	Identifikasi dan analisis tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara	Tingkat partisipasi: Terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat yang terdiri dari: manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, penentraman, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan PPMK:				
			• <i>Manipulasi</i> : permintaan persetujuan warga oleh pemerintah tentang program PPMK	√	-	-	-
			• <i>Terapi</i> : perlakuan pemerintah yang sama terhadap warga terkait program PPMK	√	-	-	-
			• <i>Pemberian informasi</i> : pemberian informasi oleh pemerintah kepada warga tanpa pemberian kesempatan untuk bertanya terkait program PPMK	√	-	-	-
			• <i>Konsultasi</i> : tanya jawab warga dengan pemerintah terhadap program PPMK	√	-	-	-
			• <i>Penentraman</i> : pemberian kesempatan kepada warga oleh pemerintah untuk memberikan saran terhadap program PPMK	√	-	-	-
			• <i>Kemitraan</i> : penetrapan saran yang diberikan warga dalam program PPMK	√	-	-	-
			• <i>Pendelegasian</i> : pemberian kesempatan oleh pemerintah kepada warga untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah terhadap program PPMK	√	-	-	-
			• <i>Kekuasaan</i> : pemberian keputusan doniman oleh pemerintah kepada warga dalam program PPMK	√	-	-	-
• <i>Pengawasan masyarakat</i> : pemberian kekuasaan penuh oleh pemerintah kepada warga dalam program PPMK	√	-	-	-			

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2009

## 1.8 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel atau teknik *sampel* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Metode ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu (Nasution,2006:98). Sampling yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat, agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Sedang rumus jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$N = N / Nd^2 + 1 \quad (\text{Sumber: Pasaribu dalam Suryawan.Adib,2004:73})$$

Keterangan:

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$D$  = Derajat Kecermatan (*level of significance*), dalam studi ini nilai derajat kecermatan yang diambil adalah sebesar 10% sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan studi sebesar 90%.

Berdasarkan rumus sampel di atas, maka selanjutnya untuk penetapan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$n$  = Jumlah sampel pada penelitian ini.

$N$  = Jumlah populasi, dalam hal ini jumlah penduduk Kelurahan Marunda Jakarta Utara, menurut data Kecamatan Cilincing Dalam Angka 2007 adalah 15.816 jiwa.

$D$  = Nilai kecermatan studi yang diharapkan 10%.

Berdasarkan asumsi di atas maka jumlah sampel yang akan diambil adalah sebesar:  $n = N / Nd^2 + 1 = 15.816 / 15.816(0,1)^2 + 1 = 101 \approx 100$  sampel.

Untuk unit pemilihan sampel adalah kepala keluarga yang bermukim di RW Kelurahan, sasaran dalam penelitian ini adalah Kelurahan Marunda yang terdiri dari 9 RW, yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) serta mampu menjawab

permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Berikut adalah tabel sebaran responden dengan jumlah 100 responden yang tersebar di 9 RW di Kelurahan Marunda Jakarta Utara:

**TABEL I.2**  
**SEBARAN RESPONDEN**

No.	Lokasi Berdasarkan RW	Jumlah Sampel per RW
1	RW I	12
2	RW II	11
3	RW III	11
4	RW IV	11
5	RW V	11
6	RW IV	11
7	RW VII	11
8	RW VIII	11
9	RW IX	11
Total Responden		100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

### 1.9 Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan metode analisa kualitatif, hal ini dipahami sebagai pendekatan kualitatif dengan ciri mengakui kebenaran berdasarkan tangkapan indrawi (apa adanya), memerlukan akal dan logika dalam menjelaskan dan berargumentasi (Muhadjir,1996:83) yang didukung dengan metode kuantitatif. Metode ini lebih cenderung digunakan dengan memakai pendekatan secara deskriptif yaitu analisis objek penelitian melalui uraian serta penjelasan dari data-data yang didapatkan guna diolah menjadi beberapa informasi.

### 1.10 Teknis Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif didukung dengan deskriptif kuantitatif serta metoda tabulasi silang. Dari data kuantitatif yang diperoleh berupa skor atau nilai sebagai data primer kemudian dianalisa dan disajikan dalam distribusi frekuensi.

Berikut adalah uraian analisis yang digunakan:

- a. Mengidentifikasi kondisi dan jumlah prasarana lingkungan yang telah dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara. Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan hasil survei sekunder dan kajian literatur sebagai bahan utama bagi proses analisis.
- b. Metode analisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan di Kelurahan Marunda Jakarta Utara. Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan data dari masyarakat, maka dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi, dapat diketahui persentase bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.
- c. Metode analisis tingkat partisipasi dalam masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan di Kelurahan Marunda Jakarta Utara. Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan data dari masyarakat, maka dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi, dapat diketahui persentase bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.
- d. Metode analisis untuk mengetahui hubungan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara.

Untuk mengetahui hubungan ini, dari hasil survei di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan model tabulasi silang. Tabulasi silang adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih dengan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya. Data dari tiap variabel dikelompokkan dalam beberapa kategori, dimana dari setiap kategori tersebut diberi skor untuk mempermudah perhitungan. Kemudian variabel-variabel yang akan diidentifikasi hubungannya disusun dalam baris dan kolom. Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien kontingensi (*contingency coefficient*), yaitu koefisien yang digunakan untuk melihat ada atau tidak, kuat atau lemahnya hubungan diantara dua variabel.

Metode tabulasi silang yang akan mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks, hasil tabulasi silang disajikan dalam bentuk suatu tabel dengan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris tabel tersebut. Untuk mengamati dan menganalisa variabel-variabel tersebut dipakai dengan tabel dua dimensi yang merupakan cara yang termudah. Dengan menggunakan SPSS maka dapat diketahui nilai Chi Square. Dengan menggunakan SPSS maka dapat diketahui nilai Chi Square. Selanjutnya nilai Chi Square akan dibandingkan dengan nilai  $X^2$  tabel. Nilai  $X^2$  tabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah nilai  $X^2$  tabel dengan  $df = 2$ , pada tingkat kepercayaan  $95\% = 5,991$ . Adapun ketentuan dalam pembuktian adanya hubungan antara bentuk partisipasi dengan kondisi sosial ekonomi adalah : Jika  $X^2$  hitung  $< X^2$  tabel ( $df k-1 \times k-1 = 2$ ),  $H_0$  : diterima; dan Jika  $X^2$  hitung  $> X^2$  tabel ( $df k-1 \times k-1 = 2$ ),  $H_1$  : diterima ( $H_0$  ditolak).

Secara keseluruhan analisis dalam penelitian ini merupakan proses yang terdiri dari *input* data, proses analisis yang dilakukan, dan *output* analisis. Proses analisis akan menjelaskan bagaimana kerangka analisis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian, seperti terlihat pada gambar berikut:



- I. BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian serta sistematika penulisan tesis.
- II. BAB II Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan, berisi tentang Pengertian Partisipasi Masyarakat, Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat, Tingkat Partisipasi Masyarakat, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Prasarana dan Sarana, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Prasarana, dan Resume Kajian Pustaka
- III. BAB III Gambaran umum Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara, yang berisi tentang Letak Geografis, Penggunaan Tanah, Jumlah Penduduk, Mata Pencaharian, Bangunan Tempat Tinggal, Fasilitas Kesehatan, Tempat Ibadah, Pendidikan, Industri, Pasar, serta Kondisi prasarana lingkungan yang dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara.
- IV. BAB IV Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara yang berisi tentang Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK), Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK), Analisis hubungan sosial ekonomi terhadap bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).
- V. BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi dan saran yang dapat disampaikan.

## **BAB II**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**

#### **2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Sebagaimana diketahui, pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas lokal merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, orang akan menemukan rumusan pengertian yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Mikkelsen (1999:64) misalnya menginventarisasi adanya enam tafsiran yang berbeda tentang partisipasi yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengadung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk menggunakan hal itu;
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak social;

5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Apabila mencermati pola pikir yang digunakan dalam menginventarisasi cara partisipasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa partisipasi dalam perencanaan lebih dimaksudkan dalam rangka memperoleh masukan tentang kondisi dan permasalahan yang ada dalam masyarakat setempat. Masukan tersebut dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari masyarakat dan merupakan hal yang dianggap penting bagi perumusan perencanaan terlepas dari apakah yang merumuskan perencanaan tersebut masyarakat sendiri atau bukan.

Memperhatikan beberapa pengertian partisipasi dan cara untuk mewujudkannya seperti yang sudah diuraikan tadi, tampak bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Dengan demikian, apabila latarbelakang yang mendorong keterlibatan dimasukkan sebagai kriteria, maka variasi pengertian partisipasi tadi akan lebih mengerucut. Beberapa pihak mencoba merumuskan pengertian partisipasi dengan memasukkan kedua kriteria tersebut. Dengan menggunakan kedua kriteria tersebut partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut. Apabila yang muncul hanya unsur keterlibatan dan tidak di dorong oleh determinasi dan kesadaran, hal tersebut tidak masuk dalam kategori partisipasi melainkan lebih tepat disebut sebagai mobilisasi.

Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, serta dalam evaluasi dan menikmati hasil.

Dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui aktivitas lokal telah terjadi proses belajar sosial yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk

berpartisipasi secara lebih baik dalam tindakan bersama dan aktifitas lokal berikutnya. Dari sudut pandang yang lain, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat berkedudukan sebagai input sekaligus output. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, dilain pihak juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan juga merupakan pencerminan, bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya bukan semata-mata pada fisik materiil.

## **2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1988:16), bentuk-bentuk partisipasi meliputi:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa;
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang;
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari pihak ketiga;
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat;
5. Sumbangan dalam bentuk kerja;
6. Aksi massa;
7. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga;
8. Membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Adapun jenis-jenis partisipasinya meliputi: (1) Pikiran; (2) Tenaga; (3) Pikiran dan tenaga; (4) Keahlian; (5) Barang; dan (6) Uang. Dari jenis-jenis partisipasi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pikiran: pikiran merupakan jenis partisipasi pada level pertama dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

2. Tenaga: merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
3. Pikiran dan Tenaga: merupakan jenis partisipasi pada level ketiga dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya konteks partisipasi tersebut berada pada suatu lembaga atau partai.
4. Keahlian: merupakan jenis partisipasi pada level keempat dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
5. Barang: merupakan jenis partisipasi pada level kelima dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
6. Uang: merupakan jenis partisipasi pada level keenam dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas.

### **2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Menurut Sherry Arnstein pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul “*A Ladder of Citizen Participation*”, dalam Panudju (1999:72-77) bahwa terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, seperti berikut:

#### **1. Manipulasi (Manipulation)**

Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah. Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan “persetujuan” dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran” atau untuk merekayasa dukungan mereka. Partisipasi masyarakat dijadikan kendaraan *public relation* oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada tingkatan ini biasanya adalah program-program pembaharuan desa. Masyarakat diundang untuk terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub

komitennya. Pemegang kekuasaan memanipulasi fungsi komite dengan “pengumpulan informasi”, “hubungan masyarakat” dan “dukungan.” Dengan melibatkan masyarakat di dalam komite, pemegang kekuasaan mengklaim bahwa program sangat dibutuhkan dan didukung. Pada kenyataannya, hal ini merupakan alasan utama kegagalan dari program-program pembaharuan pedesaan di berbagai daerah.

## **2. Terapi (Therapy)**

Untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan “penyakit” masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.

## **3. Pemberian Informasi (Informing)**

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan tokenism. Kita dapat melihat dua karakteristik yang bercampur yaitu:

1. Pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat;
2. Pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada masyarakat). Akan tetapi tidak ada umpan balik (*feedback*) dari masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media massa, pamflet, poster, dan respon untuk bertanya.

## **4. Konsultasi (Consultation)**

Konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (*artificial*) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survei mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat. Di sini

partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu. Masyarakat pada umumnya hanya menerima gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosur-brosur, atau menjawab sebuah kuesioner.

### **5. Penentruman (Placation)**

Strategi penentruman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badan-badan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada dua tingkatan dimana masyarakat ditentramkan:

- (1) Kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka;
- (2) Tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut.

### **6. Kemitraan (Partnership)**

Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah:

- (1) adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat dimana pemimpin-pemimpinnya akuntabel;
- (2) pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka;
- (3) ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer (*community organizer*) mereka sendiri.

## **7. Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power)**

Pada tingkat ini, masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-program pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar-menawar dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.

## **8. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control)**

Pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum. Pengawasan masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipan dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk menegosiasikan kondisi pada saat di mana pihak luar bisa menggantikan mereka.

Pada tingkat 1 dan 2 disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi atau *non participation*. Tingkat 3, 4, dan 5 disebut tingkat penghargaan/tokenisme atau *Degree of Tokenism*. Dan tingkat 6, 7, dan 8 disebut tingkatan kekuatan masyarakat atau *Degree of Citezen Power*.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama-sama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan oleh Chapin dalam Slamet (1993: 82-83), yaitu:

- a. Keanggotaan dalam organisasi
- b. Kehadiran di dalam pertemuan
- c. Sumbangan-sumbangan
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan
- e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan

Sementara Goldhamer dalam Slamet (1993:84), mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan lima variabel yaitu:

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki
- b. Frekuensi kehadiran
- c. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan
- d. Lamanya menjadi anggota
- e. Tipe asosiasi yang dimasuki

Berdasarkan skala partisipasi individu tersebut, maka dapat diklasifikasikan skala yang digunakan sebagai variabel untuk mengukur partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, sanitasi dan penyediaan sarana kebersihan, menurut C. Ericson dalam Slamet (1993:89) adalah:

- ***Partisipasi di dalam tahap perencanaan*** meliputi:
  1. Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan;
  2. Keaktifan dalam mengajukan saran/usul;
  3. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- ***Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan.*** Bentuk partisipasi diperinci dalam bentuk tenaga, uang dan material ataupun dalam bentuk lainnya;
- ***Partisipasi di dalam tahap pengawasan prasarana.*** Dalam tahap ini adalah akan melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan prasarana secara menyeluruh dan kesesuaian pembangunan prasarana di lapangan dengan rencana yang ditetapkan.

#### **2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Menurut Slamet (1993:97,137-143), faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata

pencapaian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh:

1. **Jenis Kelamin.** Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban anatar pria dan wanita. Menurut Soedarno et.al (1992) dalam Yulianti (2000:34), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi.
2. **Usia.** Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan, Soedarno et.al (1992) dalam Yulianti (2000:34). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994:142). Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan.
3. **Tingkat Pendidikan.** Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan. Litwin (1986) dalam Yulianti (2000:34) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

4. **Tingkat Penghasilan.** Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Barros (1993) dalam Yulianti (2000:34), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju,1999:77-78)
5. **Mata Pencarian.** Hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencarian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

Sementara itu faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program (Sunarti dalam Suciati 2007:39). Adapun faktor-faktor eksternal dalam penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah pemerintah dan swasta (LSM).

## 2.5 Pembangunan Prasarana dan Sarana

Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan. baik kota maupun kabupaten, secara tipikal harus menangani enam sektor perkotaan yang saling berhubungan, yaitu pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas sosial dan pembangunan ekonomi. (Nurmandi,1999:98).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang

dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Kodoatie,2003:9). Apabila fasilitas infrastruktur sudah dibangun lebih dahulu sebelum benar-benar dibutuhkan, dan perluasan serta penyambungan pelayanan umum sudah terjamin sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka pola perkembangan masyarakat dapat dikendalikan secara efektif (Stein dalam Catanese,1992:318).

Infrastruktur atau prasarana dan sarana diartikan sebagai fasilitas fisik suatu kota atau negara yang disebut pekerjaan umum (Grigg dalam Suripin,2004:1). Menurut UU No.4 th 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, prasarana diartikan sebagai kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan komponen-komponennya adalah jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Kodoatie,2003:9). Sektor infrastruktur mencakup air bersih, jalan/jembatan, fasilitas komunikasi serta fasilitas sanitasi dan sampah.(Nurmandi,1999:98).

Oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, prasarana dan sarana didefinisikan sebagai bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya. (Suripin,2004:2).

Pengelolaan sistem infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mempunyai beberapa dimensi yang harus dintegrasikan ke semua aspek pembangunannya, salah

satunya *political sustainability*; link birokrasi (pemerintah) dan masyarakat. Para pemimpin formal dan informal untuk suatu sector tertentu dalam masyarakat local harus mampu menjalin komunikasi dengan struktur-struktur politik dan birokrasi (Kodoatie,2003:173).

Kualitas infrastruktur suatu negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian negara tersebut. Semakin maju suatu negara, semakin besar pula kemampuan pemerintah membangun infrastruktur dengan dana sendiri (Kompas dalam Kodoatie,2003:14)

## **2.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Prasarana**

Prinsip perencanaan selalu berusaha menyertakan anggota-anggota dalam berbagai kelompok, ssesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Purba, 2005:77). Selama ini berlandaskan pada paradigma lama yang bersifat *top-down*, kegiatan perencanaan pembangunan prasarana ditentukan oleh pihak luar dengan asumsi bahwa warga dianggap tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk merencanakan pembangunan.

Persoalan kemudian, apakah memang demikian adanya, bahwa apabila perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pihak luar, warga akan mampu dan memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya dalam pengelolaan prasarana sehingga mereka akan mampu pula untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jawabannya tidak demikian; berbagai studi menunjukkan bahwa berbagai konflik sosial yang menjurus pada disintegrasi sosial makin membesar dan merusak demikian hebat, justru ketika berbagai pengelolaan prasarana lingkungan "diambil alih" oleh negara, dan tradisi pengelolaan prasarana lingkungan yang arif yang dimiliki komunitas dihapuskan.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan berpegang pada penyampaian kebenaran (*truth*), ketepatan (*appropriateness*), kejujuran/ketulusan (*sincerity*), *transparency*, *equality*, dan kepercayaan (Purba, 2005:86). Ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pembangunan prasarana diantaranya adalah:

1. Prinsip partisipatif. Harus dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan ini bukanlah milik segolongan orang atau kepentingan pihak tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan bersama dan merupakan hasil keputusan bersama, yang hasilnya akan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan;
2. Prinsip warga sebagai pelaksana, orang luar sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaan kegiatan orang luar harus menyadari bahwa mereka hanya berperan sebagai fasilitator dan bukannya guru, penyuluh atau instruktur serta pelaksana kegiatan tersebut.

Pengawasan adalah kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi (Purba,2005:91). Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi.

Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan (Purba,2005:91). Sedangkan menurut Sujamto (1989:78), pengawasan adalah ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai yang semestinya atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah segi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pekerjaan. Dilain pihak, pengawasan juga dimaksudkan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal yang bersangkutan guna menghadapi tantangan pembangunan secara menguntungkan.

Tujuan umum pengawasan adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan (Purba,2005:95). Sedangkan tujuan khusus adalah untuk:

- a. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh;
- b. Mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar yang diharapkan;
- c. Mengkaji kesesuaian tindakan aktor yang terlibat sesuai fungsinya di semua tingkatan;

- d. Mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, baik positif maupun negatif;
- e. Memperoleh rekomendasi kebijaksanaan;
- f. Membangun sistem monitoring yang dapat diandalkan untuk program pembangunan selanjutnya.

### **Resume Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirangkum kajian pustaka seperti tercantum dalam tabel berikut:

**TABEL II.1**  
**RESUME KAJIAN PUSTAKA**

NO.	DASAR TEORI	SUMBER	ASPEK	INDIKASI VARIABEL	VARIABEL TERPILIH
1	Pembangunan prasarana	Nurmandi,1999:98	Infrastruktur	Enam sektor perkotaan yang saling berhubungan, yaitu pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas sosial dan pembangunan ekonomi.	Kondisi dan jumlah yang dibangun: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jalan lingkungan</li> <li>• jembatan</li> <li>• sanitasi ( saluran )</li> <li>• penyediaan sarana pembuangan sampah</li> </ul>
		UU No.4 th 1992	Definisi prasarana	Kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah ( <i>spatial space</i> ) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan komponen-komponennya adalah jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon	
		Kodoatie, 2003:9	Sistem infrastruktur	Fasilitas infrastruktur yang sudah dibangun lebih dahulu sebelum benar-benar dibutuhkan, dan perluasan serta penyambungan pelayanan umum sudah terjamin sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka pola perkembangan masyarakat dapat dikendalikan secara efektif	
2	Partisipasi Masyarakat	Slamet (1993:97,137-143)	Faktor yang mempengaruhi partisipasi	Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian	Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usia</li> <li>• jenis kelamin</li> <li>• pendidikan</li> <li>• tingkat pendapatan</li> <li>• mata pencaharian</li> </ul>

DASAR TEORI	SUMBER	ASPEK	INDIKASI VARIABEL	VARIABEL TERPILIH
	C. Ericson dalam Slamet (1993:89)	Bentuk partisipasi	Partisipasi dalam tahap perencanaan yang pengukurannya terdiri dari beberapa unsur, yang antara lain adalah keaktifan warga mengikuti pertemuan, menyampaikan usulan/saran, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.	Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan prasarana lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• keaktifan warga meeting pertemuan</li> <li>• menyampaikan usulan</li> <li>• keterlibatan dalam pengambilan keputusan</li> </ul>
			Partisipasi dalam tahap pelaksanaan, yang pengukurannya bertitik pangkal pada sejauhmana masyarakat secara nyata terlibat di dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan dalam kegiatan fisik	Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan dalam partisipasi masyarakat yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tenaga</li> <li>• uang</li> <li>• material</li> <li>• pikiran</li> <li>• keahlian</li> </ul>
	Purba,2005:95	Pengawasan	Partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan: mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh; mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan dilapangan sesuai dengan standar yang diharapkan; mengkaji kesesuaian tindakan aktor yang terlibat sesuai fungsinya disemua tingkatan; mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, baik positif maupun negatif; Memperoleh rekomendasi kebijaksanaan;	Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan pembangunan prasarana lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya guna dan hasil guna pembangunan prasarana lingkungan</li> <li>• Kesesuaian bentuk prasarana di lapangan dengan rencana yang ditetapkan</li> </ul>

	Sujamto,1989:78		Ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai yang semestinya atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah segi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pekerjaan	
--	-----------------	--	--	--

DASAR TEORI	SUMBER	ASPEK	INDIKASI VARIABEL	VARIABEL TERPILIH
	Sherry Arnstein (1969)	Tingkat Partisipasi	Terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat yang terdiri dari: manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, penentrangan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Manipulasi</i>: permintaan persetujuan warga oleh pemerintah tentang</li> <li>• <i>Terapi</i>: perlakuan pemerintah yang sama terhadap warga terkait pro</li> <li>• <i>Pemberian informasi</i>: pemberian informasi oleh pemerintah ke</li> <li>• <i>Konsultasi</i>: tanya jawab warga dengan pemerintah terhadap progra</li> <li>• <i>Penentrangan</i>: pemberian kesempatan kepada warga oleh</li> <li>• <i>Kemitraan</i>: penetrapan saran yang diberikan warga dalam program</li> <li>• <i>Pendelegasian</i>: pemberian kesempatan kepada warga untuk me</li> <li>• <i>Kekuasaan</i>: pemberian keputusan doniman oleh pemerintah ke</li> <li>• <i>Pengawasan masyarakat</i>: pemberian kekuasaan penuh oleh p</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis Penyusun,2009

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING**  
**KOTAMADYA JAKARTA UTARA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)**

### **3.1 Letak Geografis**

Kelurahan Marunda termasuk satu dari tujuh kelurahan yang berada di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1251 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 Marunda menjadi salah satu kelurahan bagian dari Provinsi di DKI Jakarta. Dimana Marunda sebelumnya masuk dalam Kabupaten Bekasi Utara, Jawa Barat.

Kelurahan Marunda yang mempunyai luas wilayah 7,9169 Km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah tersebut hanya 30% yang di huni oleh masyarakat dan sisanya masih lahan persawahan serta rawa-rawa. Makanya tidak heran jika mata pencaharian masyarakatnya dominan pada kelompok tani tambak, nelayan, tani sawah, peternak itik dan kelompok bagan putar.

Kelurahan Marunda mempunyai daerah perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Desa Segara Makmur (Bekasi Utara)
- Sebelah Selatan : Kelurahan Rorotan
- Sebelah Barat : Kelurahan Cilincing.

### **3.2 Kondisi Fisik**

49

#### **3.2.1 Penggunaan Tanah**

Persentase luas tanah menurut statusnya dapat dibagi dua yaitu bersertifikat dan non sertifikat. Di Kelurahan Marunda, (Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007) tanah bersertifikat (30,93%) terdiri dari hak milik (11,21%), hak guna bangunan (18,72%) dan hak pakai (1,00%),

sedang sisanya adalah non sertifikat (69,07%). Untuk persentase penggunaan tanah pada tahun 2006 di Kelurahan Marunda, dapat dilihat pada Tabel III.1.

**TABEL III.1**  
**PERSENTASE PENGGUNAAN TANAH**  
**DI KELURAHAN MARUNDA, 2006**

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Persentase Penggunaan Tanah (%)
1	Perumahan	21,05
2	Industri	10,03
3	Kantor dan Gudang	1,12
4	Taman	0,00
5	Pertanian	36,60
6	Lahan Tidur	0,00
7	Lainnya	31,20
Total		100,00

*Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007*

### 3.3 Kependudukan

#### 3.3.1 Jumlah Penduduk

Dari hasil survei inventarisasi kelurahan tahun 2006, penduduk Kelurahan Marunda berjumlah 15.816 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 4.889, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL III.2**  
**LUAS WILAYAH, JUMLAH KK, PENDUDUK, KEPADATAN PENDUDUK, RT, RW DI**  
**KELURAHAN MARUNDA, 2006**

Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk			Kepadatan Penduduk	Rasio	$\Sigma$ RT	$\Sigma$ RW
		$\Sigma$ KK	Pria	Wanita				
Marunda	7,9169	4.889	8.083	7.733	1,998	104	74	9

*Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007*

#### 3.3.2 Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Marunda di dominasi oleh pekerja industri yang berjumlah sebanyak 1.716 orang, sementara urutan kedua adalah pertanian (termasuk didalamnya

kelompok tani tambak, nelayan, tani sawah, peternak itik dan kelompok bagan putar) yang berjumlah 1.208 orang. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut:

**TABEL III.3**  
**JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK**  
**KELURAHAN MARUNDA, 2006**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Pertanian	1.208
2	Industri	1.716
3	Bangunan	106
4	Perdagangan	1.168
5	Transportasi dan Komunikasi	159
6	Keuangan dan Perbankan	4
7	Pemerintahan	141
8	Jasa-jasa	117
9	Lainnya	270
Total		4.889

*Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007*

### 3.3.3 Bangunan Tempat Tinggal

Bangunan rumah tempat tinggal dapat dibagi tiga menjadi tiga bentuk yaitu bangunan permanen, semi permanen dan sementara. Mengenai kondisi bangunan tempat tinggal di Kelurahan Marunda, dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL III.4**  
**JUMLAH RUMAH PENDUDUK/BANGUNAN**  
**TEMPAT TINGGAL MENURUT KEADAAN FISIK BANGUNAN**  
**DI KELURAHAN MARUNDA, 2006**

No.	Keadaan Fisik Bangunan	Jumlah (unit)
1	Permanen	1.282
2	Semi permanen	1.103
3	Sementara	1.168
Total		3.553

*Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007*

Sementara untuk lokasi tempat tinggal di Kelurahan Marunda yang berhubungan dengan tempat-tempat yang tidak diinginkan, disajikan pada tabel berikut:

**TABEL III.5**  
**JUMLAH KK YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LOKASI**  
**YANG TIDAK DIINGINKAN, DI KELURAHAN MARUNDA, 2006**

No.	Lokasi Tempat Tinggal	Jumlah KK
1	Radius Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	12
2	Bantaran sungai	964
3	Rel Kereta	0
Total		976

*Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007*

### 3.4 Kondisi Sarana Lingkungan

#### 3.4.1 Fasilitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kelurahan Marunda diarahkan pada prioritas untuk memberikan pelayanan secara murah, merata dan mudah kepada masyarakat, dengan beberapa fasilitas seperti terlihat pada tabel berikut:

**TABEL III.6**  
**FASILITAS KESEHATAN DI KELURAHAN MARUNDA, 2006**

Kecamatan dalam Angka,	No.	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)
	3.4.2 Ibadah	1	Rumah Sakit
2		Rumah Bersalin	0
3		Poliklinik/Balai Pengobatan	0
4		BKIA	0
5		Puskesmas	1
6		Pos KB	0
7		Posyandu	4
8		Apotik	1
9		Bidan Praktek	3
10		Dokter Praktek	4
11		Dukun Pijat/Bayi	4
Jumlah		17	

*Sumber:*  
*Cilincing*  
*2007*

**Tempat**

Tempat ibadah di Kelurahan Marunda terdiri dari mesjid, langgar, gereja dan lainnya seperti tersaji pada table berikut:

**TABEL III.7**

### TEMPAT IBADAH DI KELURAHAN MARUNDA, 2006

No.	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah (unit)
1	Mesjid	7
2	Langgar/Mushola/Surau	12
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Kuil/Klenteng	0
Total		19

Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007

#### 3.4.3 Pendidikan

Di Kelurahan Marunda, fasilitas pendidikan terbagi atas dua yaitu fasilitas formal dan non formal. Fasilitas pendidikan formal terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, Akademi dan PT, sedang fasilitas pendidikan non formal terdiri dari tempat-tempat kursus. Lebih jelasnya seperti tersaji dalam tabel berikut:

**TABEL III.8**  
**SARANA PENDIDIKAN**  
**DI KELURAHAN MARUNDA, 2006**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)
1	TK	2
2	SD	5
3	SMP	2
4	SMA	5
5	Akademi	0
6	PT	1
Jumlah		13

Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007

#### 3.4.4 Industri

Perusahaan industri di Kelurahan Marunda dibedakan menjadi empat yaitu industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Jumlah industri yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL III.9**  
**INDUSTRI MENURUT JENISNYA**  
**DI KELURAHAN MARUNDA, 2006**

No.	Jenis Industri	Jumlah (unit)
1	Besar	6
2	Sedang	2
3	Kecil	0
4	Rumah Tangga	0
Total		8

Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007

### 3.4.5 Pasar

Jenis pasar yang ada di Kelurahan Marunda terdiri dari pasar inpres, pasar lingkungan dan lainnya seperti terlihat pada tabel berikut:

**TABEL III.10**  
**JUMLAH PASAR MENURUT JENISNYA**  
**DI KELURAHAN MARUNDA, 2006**

No.	Jenis Pasar	Jumlah (unit)
1	Inpres	0
2	Lingkungan	0
3	Kaki Lima	62
4	Waserda	1
5	Swalayan	0
6	Mall	0
Jumlah		63

Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007

### 3.4.6 Komunikasi

Fasilitas komunikasi di Kelurahan Marunda terdiri dari Kantor Pos, Telepon Umum, Wartel, dan Bis Surat. Jumlah fasilitas komunikasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL III. 11**  
**BANYAKNYA FASILITAS KOMUNIKASI**  
**DI KELURAHAN MARUNDA, 2006**

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)
1	Kantor Pos	1
2	Telepon Umum	24
3	Bis Surat	0
4	Wartel	6
Total		31

Sumber: Kecamatan Cilincing dalam Angka, 2007

## 3.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

### 3.5.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan (*empowering*), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk memberikan bantuan masyarakat dengan pendekatan "Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)" melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program tersebut bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang.

Program PPMK ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan *Tribina* sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, yaitu meliputi Bina Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan. Alokasi dari ketiga pendekatan ini akan dilihat dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat masing-masing RW di kelurahan melalui hasil identifikasi bersama-sama masyarakat dan Fasilitator Kelurahan yang korelasinya terwujud dalam penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Bantuan kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diusulkan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri dengan pendampingan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumberdaya manusia dalam penguatan kelembagaan yang disalurkan kepada Kelompok-kelompok Masyarakat Pemanfaat (KOMAT) di RW-RW melalui kelembagaan Dewan Kelurahan (DK) dan TPK RW di masing-masing kelurahan dan Lurah berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Proyek (Pimpro).

Dalam mengelola keuangan PPMK, Dewan Kelurahan diharuskan membuka dua rekening yang terdiri dari Rekening Pertama untuk menampung dana yang disalurkan Pemda DKI Jakarta dan Rekening Kedua untuk menampung pengembalian dana bergulir dari masyarakat.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di rekening Dewan Kelurahan yang pertama digunakan untuk membiayai proposal yang telah disetujui. Dana tersebut hanya dapat dicairkan

oleh Kelompok Masyarakat Pemanfaat atau KOMAT dengan *countersign* dari Dewan Kelurahan beserta LSM Pendamping. Rekening Pertama Dewan Kelurahan ini dapat berfungsi untuk pemantauan tingkat penyerapan dana di masyarakat. Untuk menampung pengembalian dana bergulir dari masyarakat, Dewan Kelurahan menggunakan Rekening Kedua guna memantau pengaliran dana di tingkat RW maupun Kelurahan.

### **3.5.2 Tujuan**

1. Memberdayakan masyarakat yang berbasis di komunitas RW, mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya.
3. Memanfaatkan institusi yang ada di masyarakat (Dewan Kelurahan), Kepengurusan RW, RT, dengan membentuk TPK RW dan Forum Warga.
4. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi dan mensinergikan program bantuan dari Pemerintah (*Matching Fund*).
5. Menyiapkan kemampuan perorangan dan keluarga melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada kelompok usaha kecil dan menengah.

### **3.5.3 Sasaran Program**

Masyarakat yang bermukim di RW-RW Kelurahan sasaran beserta institusi kemasyarakatan yang ada perlu diberdayakan, agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di RW/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan serta mampu menjawab permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan.

### **3.5.4 Lingkup Program**

Dalam lingkup program PPMK lebih menitik beratkan pada aktivitas yang menunjang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan:

1. Usaha produktif dan memperluas kesempatan kerja.
2. Prasarana dan sarana dasar lingkungan.
3. Usaha bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok usaha kecil dan menengah.
4. Kelembagaan masyarakat di tingkat RW dan Kelurahan, dalam penumbuhan demokratisasi serta mengatasi permasalahan sosial.
5. Potensi dan partisipasi masyarakat (matching fund) untuk mengimbangi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) agar program tersebut dapat lebih berdaya guna.

### **3.5.5 Lokasi**

Lokasi sasaran penerima bantuan PPMK difokuskan pada satuan permukiman setingkat RW di Kelurahan. Satuan permukiman mempunyai makna yang penting mengingat disinilah muncul interaksi, kebersamaan dan kesepakatan atas dasar kepentingan yang sama.

Selain itu, pada satuan-satuan permukiman terkonsentrasi pula berbagai kegiatan dan kondisi sosial, ekonomi serta fisik lingkungan dengan kepranataannya. Lokasi sasaran perlu dilihat secara utuh di dalam melaksanakan kegiatan sehingga dimungkinkan adanya integrasi beberapa satuan permukiman.

Sebagai tahap pertama, PPMK ditetapkan di 25 kelurahan percontohan, selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### **3.5.6 Masyarakat Pemanfaat**

1. Masyarakat Kelurahan yang terdiri dari berbagai strata sosial yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat dilingkungannya, dan tidak berharap pamrih;

2. Kelompok Masyarakat Pemanfaat (Komat), yaitu anggota masyarakat yang memiliki usaha secara berkelompok atau individual, dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian dalam hal kesehatan lingkungan ataupun sosial;
3. Lembaga Masyarakat, yang diakui keberadaannya oleh masyarakat dan terbentuk atas dasar demokrasi, yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan warganya.

### 3.5.7 Asas PPMK

1. **Keadilan:** Memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama
2. **Kejujuran:** Membuka hati nurani seluruh unsur manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam masyarakat
3. **Kemitraan:** Menjalin kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan.
4. **Kesederhanaan:** Proses kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang sederhana, mudah dipahami dalam hal ketentuan dan aturan baik secara administratif maupun teknis.
5. **Kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan (Gender),** semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

### 3.5.8 Prinsip PPMK

1. **Demokrasi:** Partisipasi menyeluruh dibangun atas persamaan hak dan kewajiban, berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, dan berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambil keputusan tertinggi.
2. **Partisipasi:** Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan.

3. **Transparansi:** Semua kegiatan dari awal (perencanaan), Pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan seluruh proses PPMK dan informasinya dapat diakses oleh para stakeholder, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. **Akuntabilitas:** Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif.
5. **Desentralisasi:** Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya melalui institusi lokal.
6. **Keberlanjutan:** Hasil-hasil kegiatan dapat dilestarikan dan di tumbuh kembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional

### **3.5.9 Komponen Biaya Proyek**

Biaya proyek PPMK terdiri dari (1) Komponen Biaya Operasional Pengelolaan (BOP), (2) Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Komponen BOP, akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh aparat dan LSM pendamping. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dipergunakan untuk membiayai komponen fisik, ekonomi dan sosial yang proporsinya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kelurahan.

### **3.5.10 Komponen BLM**

1. Komponen fisik Komponen ini meliputi perawatan, perbaikan, maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan setempat secara hibah dengan mengupayakan/ mensinerjikan potensi yang ada di masyarakat.

Berbagai jenis komponen fisik prasarana dan sarana yang dapat diusulkan, misalnya:

- a. Prasarana dan sarana fisik lingkungan yang mengarah kepada penyehatan lingkungan, seperti perbaikan saluran air buangan rumah tangga, penanganan sampah, ruang terbuka hijau atau taman.

- b. Pos layanan kesehatan, pos keamanan lingkungan dan bencana.
- c. Prasarana dan sarana bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat (jalan, jembatan, sarana pasar tidak permanen).
- d. Komponen-komponen lain yang disepakati bersama, kecuali pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah, kantor dan fasilitas RT/RW, DK maupun kelurahan.

Sedangkan untuk komponen fisik yang bersifat pinjaman bergulir yang bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan dan keluarga adalah:

- a. Perbaikan rumah sehat, baik ruang luar maupun dalam, misalnya perbaikan ventilasi udara, jendela;
- b. MCK/Jamban umum yang dikelola individu atau kelompok.

Kegiatan fisik yang secara tegas dinyatakan tidak akan didanai PPMK adalah:

- a. Kegiatan yang melibatkan pembebasan tanah;
  - b. Pembangunan/Perbaikan sarana dan prasarana tempat ibadah;
  - c. Pembangunan kantor dan fasilitas RT, RW dan kelurahan.
2. Komponen kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah (bantuan bergulir) Kegiatan ekonomi yang dimaksud di sini meliputi kegiatan dana bergulir untuk membiayai modal usaha usaha kecil dan menengah (Standar Deprindag) yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang menghimpun diri dalam KOMAT antara lain:
- a. Pengembangan usaha kecil dan mikro bagi masyarakat yang telah memiliki usaha (termasuk modal investasi);
  - b. Pengembangan industri rumah tangga, perdagangan barang dan jasa (jenis komoditi yang tidak terlarang);
  - c. Pengembangan usaha kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja (*Job Seeker*);
  - d. Pertanian, Peternakan yang terfokus pada argopolitan.

Kegiatan bidang ekonomi yang secara tegas dinyatakan tidak akan didanai PPMK adalah:

- a. Pembukaan warung baru atau usaha baru tidak dianjurkan, terutama pada kawasan yang keadaan pasarnya telah mencapai titik jenuh. (pertimbangan kelayakan usaha);
  - b. Pembuatan atau penjualan komoditi yang dilarang, seperti obat-obatan terlarang, minuman keras dan sejenis senjata api atau tajam;
  - c. Kegiatan usaha yang memberikan pengaruh negatif terhadap tatanan sosial, moral dan lingkungan hidup di masyarakat;
  - d. Pendepositoan dana pada lembaga keuangan atau pinjaman uang untuk dipinjamkan kembali kepada pihak ketiga.
3. Komponen Kegiatan Sosial Untuk Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) yang meliputi: pertemuan-pertemuan, penyiapan proposal, proses seleksi dan administrasi lainnya di tingkat RW dan Kelurahan yang dikelola TPK dan UPK dialokasikan sebesar 1,5% dari dana BLM. Pencairan dana BKL ini dimasukkan kepada komponen dana sosial yang pencairannya dilakukan secara proporsional dari total nilai proposal yang disetujui.

Di samping itu, komponen diarahkan kepada kegiatan "persiapan masyarakat". Program persiapan masyarakat dimaksud terdiri dari: kegiatan penyadaran masyarakat (proses animasi) dan penguatan kelembagaan masyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya proses penanggulangan masalah kesejahteraan sosial oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Komponen kegiatan persiapan masyarakat meliputi pelatihan, rapat/pertemuan warga, dan sebagainya. Kegiatan rapat dan pertemuan diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga RW di Kelurahan sasaran. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial kelembagaan masyarakat, dan juga untuk mendukung upaya kesempatan kerja dan peluang pengembangan usaha yang telah ada, serta penumbuhan demokratisasi dan penanggulangan masalah sosial dan bencana.

Dalam pelaksanaan PPMK, dikembangkan beberapa indikator kinerja yang digunakan sebagai bahan untuk mengenali permasalahan pelaksanaan proyek secara dini. Indikator kinerja

PPMK didasarkan pada aspek-aspek masukan (*input*), proses, keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*).

Indikator aspek masukan (*input*) meliputi antara lain:

1. Jumlah RW di Kelurahan yang mendapatkan bantuan dan kebutuhan;
2. Jumlah fasilitator/pendamping lapangan sebanyak 2 orang di setiap Kelurahan sasaran terhadap layanan pendampingan.

Indikator proses meliputi antara lain:

1. Waktu kegiatan oleh Pelaksana (*Time Schedule*);
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan (*Design Programme*);
3. Proses pengawasan dan kendali program serta keterlibatan unsur intern & ekstern program (Jumlah pengaduan & Jumlah kebijakan);

Indikator aspek keluaran (*output*) meliputi antara lain: jumlah usulan yang diajukan; persentase usulan yang disepakati untuk dibiayai; pengembalian pinjaman; modal awal (persentase dari kewajiban); bunga (persentase dari kewajiban); persentase penyelesaian pekerjaan; jumlah penerima manfaat.

Indikator aspek dampak hasil (*outcome*) meliputi antara lain: tingkat penguasaan keterampilan praktis bagi masyarakat penerima manfaat; persentase jumlah orang yang diteliti yang mengetahui keberadaan program; persentase jumlah orang yang diteliti yang merasa puas dengan keberadaan program; adanya peningkatan jumlah omset yang berputar dari usaha produktif di Kelurahan sasaran; meningkatnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran; meningkatnya kepedulian dan partisipasi warga terhadap perkembangan kelurahan.

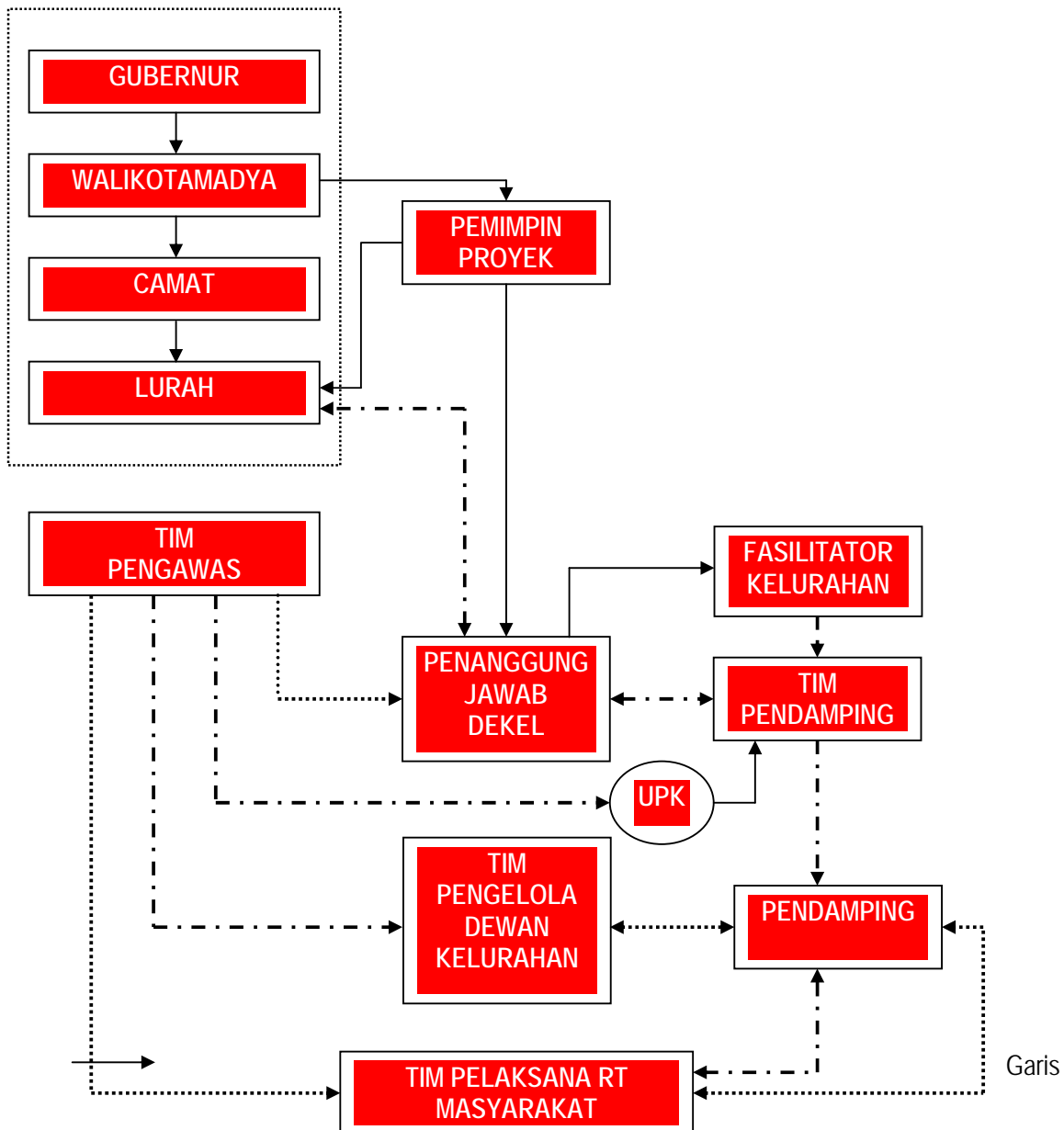
### **3.5.11 Kegiatan PPMK**

Program PPMK lebih menitik beratkan pada aktivitas yang menunjang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan: usaha produktif dan memperluas kesempatan kerja; prasarana dan sarana dasar lingkungan; usaha bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok usaha kecil dan

menengah; kelembagaan masyarakat di tingkat RW dan kelurahan dalam penumbuhan demokratisasi serta mengatasi permasalahan sosial, potensi dan partisipasi masyarakat (*matching fund*) untuk mengimbangi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) agar program tersebut dapat lebih berdaya guna.

### 3.5.12 Struktur Organisasi Pelaksanaan PPMK

Struktur organisasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 3.1.





*Sumber: Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta, 2003*

### **GAMBAR 3.1** **STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PPMK** **DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

#### **3.6 Pemanfaatan Dana PPMK**

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) lahir sebagai sebuah kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi krisis ekonomi yang berdampak pada masyarakat kecil. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1998, dan menghasilkan kantong-kantong kemiskinan di berbagai daerah, tak terkecuali di Jakarta.

Instrumen hukum pelaksanaan PPMK adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, khususnya pasal 27 mengenai keberadaan Dewan Kelurahan sebagai mitra pemerintah kelurahan, yang mempunyai tugas untuk menampung aspirasi warga kelurahan, memberikan usul dan saran kepada lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, menjelaskan kebijakan pemerintah kelurahan kepada warga kelurahan, membantu lurah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang Dewan Kelurahan.

Pemerintah DKI Jakarta memandang perlunya memberikan bantuan masyarakat dengan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil. Bantuan kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diusulkan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri, serta dapat bermanfaat bagi modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia.

PPMK menggunakan tiga pendekatan dan prosentase pendistribusian dana. Pendekatan pertama adalah bina sosial (20%) menyangkut penguatan kelembagaan sosial masyarakat,

pendekatan kedua adalah pendekatan fisik (20%) berupa penggunaan dana sebagai stimulus pembangunan yang dikelola masyarakat, yang harapannya ditindaklanjuti dengan swadaya di kalangan masyarakat sendiri. Kedua pendekatan ini ditunjang serta oleh program-program lain yang langsung turun ke masyarakat. Pendekatan ketiga adalah pendekatan ekonomi (60%), dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat (atau individu) yang terkena dampak krisis ekonomi. Pada Tabel III.12, dapat dilihat tentang penggunaan dana PPMK pada pembangunan fisik di Kelurahan Marunda, dari tahun 2004 sampai tahun 2006.

**TABEL III.12**  
**JENIS PRASARANA LINGKUNGAN YANG DIBANGUN**  
**DI KELURAHAN MARUNDA MELALUI DANA PPMK**  
**TAHUN 2004, 2005, 2006**

No.	Jenis Prasarana	Volume	Lokasi	Jenis Prasarana	Volume	Lokasi	Jenis Prasarana
PELAKSANAAN PPMK TAHUN 2004				PELAKSANAAN PPMK TAHUN 2005			
1	Peninggian jalan lingkungan	500 X 1,5 X 0,70 M	RT 001,002,003,005 RW 01	Pembelian tong sampah + tiang	510 TITIK	RT 001 S/D 009, RW 01	Peninggian dan peng jalan lingkungan
2	Perbaikan jalan lingkungan	350 X 1,5 X 0,70 M	RT 001,002,007, RW 02	Pengadaan gerobak sampah	8 UNIT	RT 001 S/D 008, RW 01	Perbaikan jalan lingku
3	Perbaikan jembatan	3 UNIT	RT 001, 002, 003 RW 02	Peninggian jalan lingkungan	250 X 1,2 X 0,70 M	RT 005, 006, RW 01	Perbaikan saluran air gorong-gorong
4	Perbaikan saluran air	350 X 0,50 X 0,30 M	RT 004, 012, 013, 014, RW 03	Perbaikan jalan lingkungan	850 X 105 X 0,70 M	RT 001 S/D 013, RW 02	Perbaikan jalan lingku
5	Pembuatan gorong-gorong	6 X 0,50 X 0,50 M	RT 002, 003, RW 03	Perbaikan saluran air dan gorong- gorong	474 X 0, 70 M	RT 002, 003, RW 03	Perbaikan jalan lingku
6	Perbaikan jalan lingkungan	470 X 1,5 X 0,70 M	RT 001,004,007 RW 04	Perbaikan jalan lingkungan	500 X 1,5 X 0,70 M	RT 001, 005, 007, RW 04	Perbaikan jalan lingku
7	Perbaikan jalan lingkungan	400 X 1,5 X 0,70 M	RT 001, 003, 004, 006, 007, 008, RW 05	Pengadaan gerobak sampah	4 UNIT	RT 006, 007, RW 04	Perbaikan jalan lingku
8	Perbaikan jembatan	2 UNIT	RT 005, RW 05	Perbaikan saluran air	150 X 0,30 X 0,30 M	RT 001 S/D 007, RW 04	Perbaikan saluran air pengerukan lumpur
9	Perbaikan saluran air	200 X 0,50 X 0,30 M	RT 004, 005, 006, 007, 008, RW 06	Perbaikan jalan lingkungan	865 X 1,5 X 0,70 M	RT 001 S/D 008, RW 05	
10	Perbaikan jalan lingkungan	300 X 1,5 X 0,70 M	RT 003, 004, 006, 007, 008, RW 06	Perbaikan jalan lingkungan	210 X 1,5 X 0,70 M	RT 001 S/D 007, RW 06	
11	Perbaikan jalan lingkungan	700 X 1,5 X 0,70 M	RT 001, 003, 009, RW 07	Perbaikan saluran air	100 X 1,5 X 0,70 M	RT 001 S/D 008, RW 06	
12	Pembuatan saluran air	300 X 0,50 X 0,30 M	RT 003, 004, RW 09	Perbaikan jalan lingkungan	700 X 1,5 X 0,70 M	RT 001 S/D 009, RW 07	
13				Pembuatan saluran air dan turap	120 X 0,50 X 0,50 M	RT 001 S/D 004, RW 09	
14				Penambahan bak sampah	100 UNIT	RT 001 S/D 004, RW 09	

Sumber: Laporan Dewan Kelurahan Marunda, 2004, 2005, 2006

**BAB IV**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)**  
**DI KELURAHAN MARUNDA JAKARTA UTARA**

**4.1 Analisis Kualitas dan Kuantitas Prasarana Lingkungan yang Dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara**

Sebagai program unggulan DKI Jakarta, PPMK sepenuhnya bertumpu pada APBD dan merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemda DKI Jakarta. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dikelola oleh institusi masyarakat di tingkat RW dan Kelurahan yang berbasis pada masyarakat. Dalam hal ini dipercayakan kepada Dewan Kelurahan (Dekel) yang dipilih oleh masyarakat dari tingkat RT, RW dan di tingkat Kelurahan. Dekel sebagai lembaga konsultatif yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, dibantu oleh Tim Pelaksana yaitu UPK di tingkat Kelurahan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di tingkat RW. Sehingga, usulan kegiatan, pelaporan dan pengguliran dana (ekonomi) melalui mekanisme rekomendasi RT, RW dan berakhir pada keputusan Dekel bersama dengan Kelurahan dan wakil tokoh masyarakat.

Kelurahan Marunda, merupakan salah satu kelurahan yang menerima dana pembangunan pada bidang fisik. Namun kondisi prasarana yang dibangun belum seperti yang diharapkan. Berikut adalah uraian tentang analisis kualitas dan kuantitas prasarana lingkungan yang dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara.

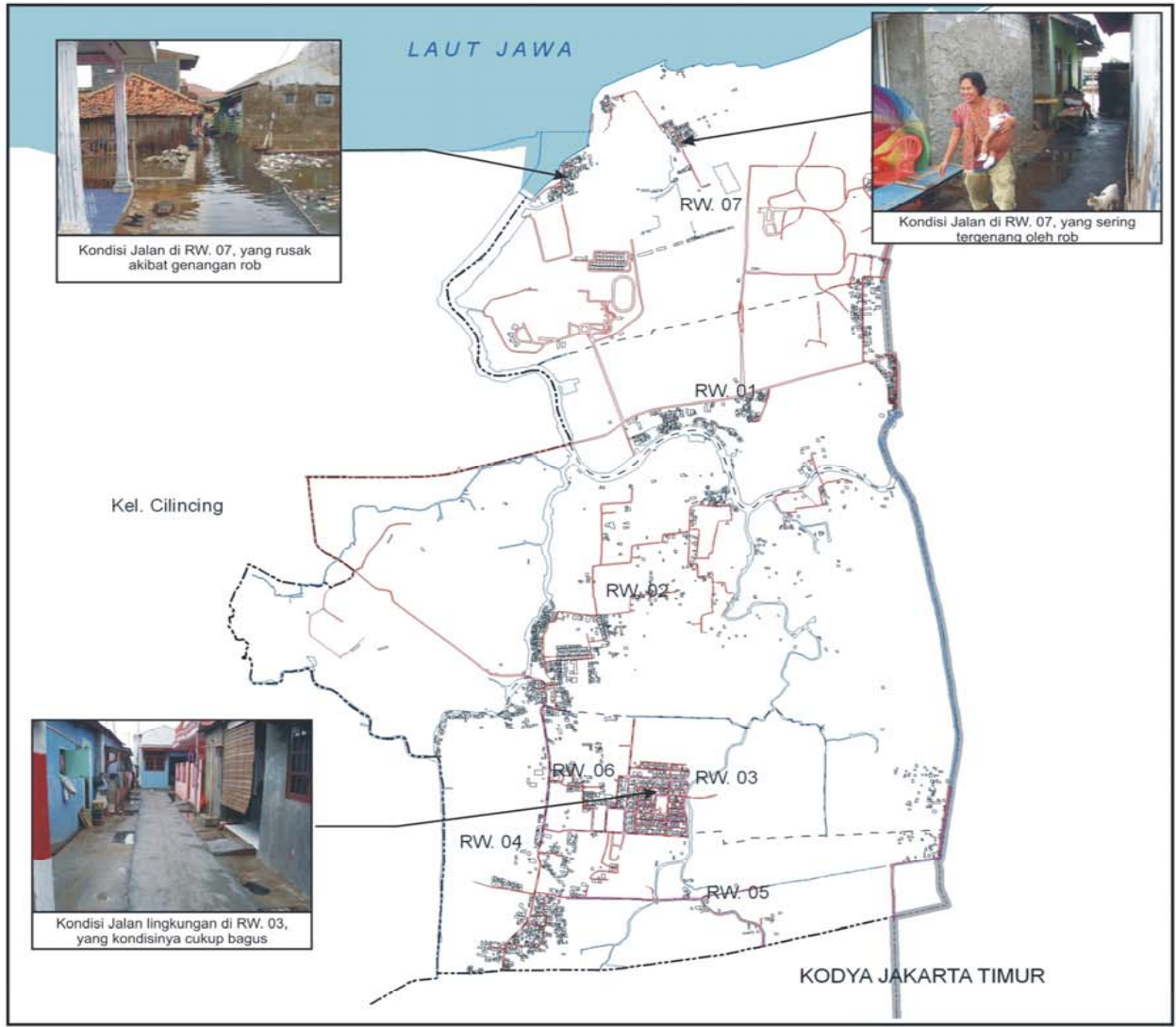
**4.1.1 Jalan Lingkungan**

Di kelurahan Marunda, <sup>71</sup> jalan lingkungan merupakan prasarana yang paling mendapat perhatian. Selain karena jalan lingkungan ini merupakan enablers yang memungkinkan terjadinya kegiatan sosial ekonomi, banjir pasang acapkali mengakibatkan kerusakan jalan lingkungan sehingga pembangunannya lebih diprioritaskan. Akan tetapi pembangunan jalan

lingkungan seringkali tidak terintegrasi dengan penyediaan drainase, sehingga meskipun sebagian jalan lingkungan ini telah dibetonisasi, namun problem genangan air masih dijumpai.

Sebagai kawasan yang sering mengalami rob (pada saat peneliti berada di lokasi juga terjadi rob), maka hampir sebagian besar pemanfaatan dana PPMK digunakan untuk jalan lingkungan karena kondisinya selalu cepat rusak akibat terendam rob yang hampir setiap saat terjadi di Kelurahan Marunda. Jumlah jalan lingkungan yang dibangun, sama dengan banyaknya jumlah RT dan RW yang ada di Kelurahan Marunda. Namun perlu diketahui, bahwa pembangunan ataupun perbaikan jalan lingkungan ini tidak dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan anggaran dari PPMK.

Berikut adalah sebagian kondisi jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Marunda :




  
**MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

**TESIS**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)**  
**DI KELURAHAN MARUNDA KODYA JAKARTA UTARA**

**PETA**  
**KONDISI JARINGAN JALAN LINGKUNGAN**  
**DI KELURAHAN MARUNDA**

**Legenda**

 Batas Propinsi	 Jalan
 Batas Kelurahan	 Sungai
 Batas RW	 Bangunan
 Garis Pantai	

Inset Peta



  
 N  
 Gambar 4-1

Skala Peta  


Sumber Peta:  
 Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Dinas Pertanahan dan Pemetaan

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa berdasarkan klasifikasi jalan di lingkungan perumahan yang disusun Dirjen Cipta Karya (1988:39), termasuk jalan lingkungan II. Dimana persyaratan jalan lingkungan II ini adalah: bentuk jalan perkerasan dengan lebar jalur  $\pm 1,2$  meter, penghubung lingkungan I ke lingkungan II menuju pusat lingkungan yang lain dengan akses yang lebih tinggi hirarkinya dan digunakan khusus pejalan kaki dan penjual dorong. Masih menurut Dirjen Cipta Karya, bahwa lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Dalam merencanakan jaringan jalan, harus mengacu pada ketentuan teknis tentang pembangunan prasarana jalan perumahan, jaringan jalan dan geometri jaringan jalan yang berlaku. Jenis prasarana dan utilitas pada jaringan jalan yang harus disediakan ditetapkan menurut klasifikasi jalan perumahan yang disusun berdasarkan hirarki jalan, fungsi jalan, dan kelas kawasan/lingkungan perumahan.

Dari gambar terlihat pula bahwa ada beberapa jalan lingkungan yang sudah sesuai persyaratan. Namun disisi lain, genangan rob menjadi pemandangan sehari-hari di sebagian kelurahan Marunda. Betapa kondisi ini sebenarnya sangat mengganggu, namun menurut pengakuan warga yang bermukim di lokasi tersebut bahwa mereka sudah terbiasa dengan kondisi ini. Pada hal tersebut sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

Menurut Lasino (2002:1-4), berbagai pengaruh yang diakibatkan terjadinya genangan terhadap manusia, tergantung dari sifat jenis dan kondisi lingkungan yang dilanda. Pada pemukiman yang terletak didaerah pantai, tetapi

arus atau gelombang lautnya tidak terlampau kuat, maka kenaikan permukaan air laut hanya akan menggenangi daerah permukiman. Tetapi didaerah yang memiliki gelombang laut yang kuat maka pengaruhnya akan lebih kompleks lagi seperti terjadinya abrasi dan sebagainya. Dengan uraian diatas, secara umum pengaruh genangan terhadap kehidupan manusia dapat dipilah menjadi 2 tahap yaitu:

1. *Tahap gangguan*, dimana pada tahap ini masyarakat baru merasa terganggu kenyamanannya sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa atau berkurangnya fungsi rumah sebagai tempat tinggal dan pembinaan keluarga serta berkurangnya fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
2. *Tahap ancaman*, dimana pada tahap ini masyarakat sudah mulai terancam keselamatannya baik pada saat terjadinya banjir akibat derasnya aliran atau longsor yang dapat merobohkan bangunan maupun pasca banjir dengan munculnya berbagai wabah penyakit serta gangguan kesehatan lainnya.

Dampak yang lebih luas dari banjir adalah rusaknya lingkungan, yang akan berpengaruh terhadap banyak aspek kehidupan atau ekosistem yang ada. Pada lingkungan permukiman ini akan berakibat pada terhentinya kegiatan ekonomi dan stagnasi usaha, pendidikan, perdagangan, industri dan sebagainya, disamping rusaknya sarana dan prasarana yang tersedia. Perubahan kondisi lingkungan ini juga akan berpengaruh terhadap fungsi lahan dan nilai ekonomis terutama akibat adanya genangan yang secara langsung akan mengganggu aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini akan menambah deretan nilai kerugian yang timbul, sehingga perlu kebijaksanaan penangan yang lebih tepat dan strategis.

Perubahan lingkungan yang tidak diantisipasi secara dini akan menimbulkan rasa *sock* dan cemas pada manusia yang mengalami sehingga secara psikologis menjadi beban yang sangat berat atau dapat disebut *stress* pada seseorang. Reaksi seseorang dalam menghadapi kondisi genangan atau situasi tersebut sangat berbeda-beda bergantung pada kemampuan dari masing-masing individu dalam mengolah situasi lingkungan yang menjadi penyebabnya.

Pada daerah permukiman yang mengalami genangan dengan kenaikan permukaan air laut yang berangsur-angsur sehingga fenomenanya dapat terprediksi lebih awal, kondisi ini dapat diantisipasi secara dini sehingga tidak menimbulkan *sock* kepada masyarakat yang lebih berat, hanya secara jangka panjang perlu penanganan yang lebih baik dan terencana lagi. Sedangkan kondisi banjir yang datang secara tiba-tiba akan lebih memberikan *stress* yang lebih besar sehingga selain kerugian fisik juga dapat mengakibatkan perubahan perilaku pada masyarakat akibat gangguan pada kehidupan yang lebih besar.

Adanya peristiwa banjir atau genangan yang sering menimpa dirinya, maka masyarakat di wilayah tersebut akan semakin terbiasa dengan kondisi yang dialami sehingga lama-lama pengaruh secara psikologis akan semakin berkurang sehingga mereka tidak lagi mengeluh kondisi fisiknya. Keluhan fisik dan psikologis dapat muncul manakala kondisi masyarakat sedang mengalami genangan yang cukup lama, atau besarnya banjir yang menimpa permukiman. Oleh karena itu nampaknya masyarakat di daerah genangan dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

#### 4.1.2 Saluran Air Limbah Rumah Tangga

Dari hasil pengamatan di lapangan, terlihat beberapa keluarga sudah mengupayakan selokan-selokan air di sekitar rumahnya, namun kurang representatif, selain ukurannya kecil juga kondisi tidak terawat. Selain itu beberapa diantaranya belum terintergrasi satu sama lain. Hal ini menyebabkan saluran-saluran tersebut tidak berfungsi maksimal. Akibatnya lingkungan pemukiman kelihatan menjadi kumuh, ditambah dengan bau yang tidak sedap.

Dari gambar terlihat bahwa sistem saluran yang digunakan adalah sistem terbuka. Dimana saluran terbuka ini biasanya direncanakan hanya untuk menampung dan mengalirkan air hujan (Kodoatie, 2005:138). Namun kebanyakan sistem saluran ini berfungsi sebagai saluran campuran dimana misalnya sampah dan limbah penduduk dibuang ke saluran tersebut.

Berdasarkan gambar, terlihat bahwa saluran air limbah belum memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam SNI 03-2398-2002 tentang tata cara perencanaan tangki septic dengan sistem resapan, serta pedoman tentang pengelolaan air limbah secara komunal pada lingkungan perumahan yang berlaku. Adapun jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air limbah yang harus disediakan pada lingkungan perumahan adalah *septic tank*, bidang resapan, dan jaringan pemipaan air limbah.



MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

**TESIS**

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)  
DI KELURAHAN MARUNDA KODYA JAKARTA UTARA

PETA  
KONDISI SALURAN AIR LIMBAH  
DI KELURAHAN MARUNDA

Legenda

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| Batas Propinsi  | Jalan    |
| Batas Kelurahan | Sungai   |
| Batas RW        | Bangunan |
| Garis Pantai    |          |

Inset Peta



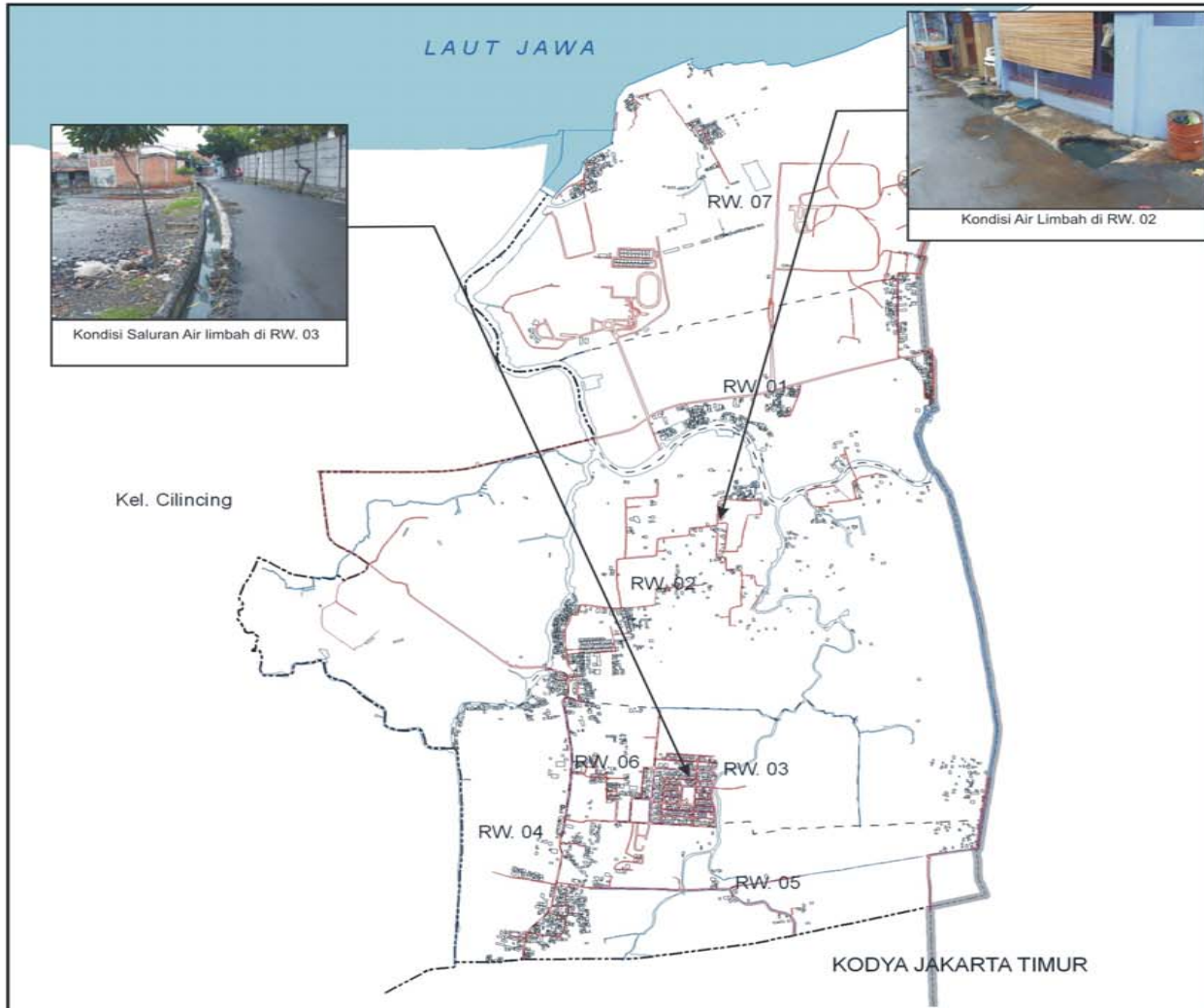
Gambar 4-2

Skala Peta



Sumber Peta:

Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dinas Pertanahan dan Pemetaan

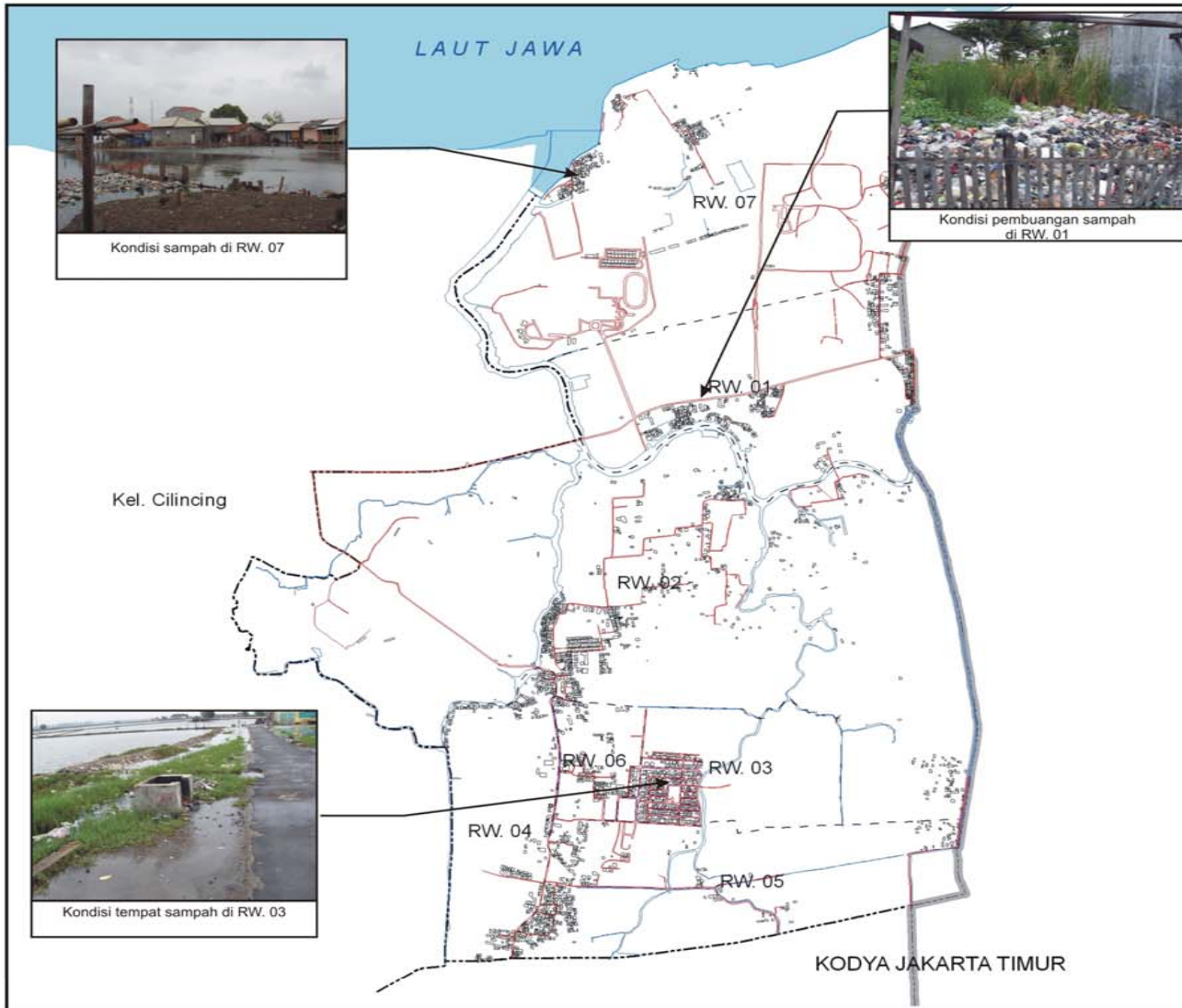



Apabila kemungkinan membuat tangki *septic tank* tidak ada, maka lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah lingkungan atau harus dapat disambung pada sistem pembuangan air limbah kota atau dengan cara pengolahan lain. Apabila tidak memungkinkan untuk membuat resapan pada setiap rumah, maka harus dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah.

#### **4.1.3 Tempat Pembuangan Sampah**

Dana yang berasal dari PPMK juga dipergunakan dalam pembuatan tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Jumlahnya hampir tersebar di seluruh RT dan RW yang ada di Kelurahan Marunda. Kondisi TPS di lapangan adalah ukurannya kecil dan tidak terawat, juga banyak warga yang justru tidak membuang sampah di tempat sampah yang disediakan. Akibatnya sampah menumpuk dimana-mana, sehingga menyebabkan kekumuhan.

Berdasarkan gambar terlihat bahwa hampir sebagian besar dana PPMK yang diperuntukkan untuk tempat pembuangan sampah dibangun dalam bentuk bak sampah kecil. Hal ini sebenarnya sudah tepat, karena mengingat bak sampah ini dibangun di tiap RW, dimana sesuai ketentuan dari SNI 19-2454-2002 mengenai Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, bahwa setiap RW yang memiliki penduduk sebanyak 2.500 jiwa harus dibangun tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dengan dimensi 6 m<sup>3</sup> serta gerobak sampah dengan dimensi 2 m<sup>3</sup>.



  
 MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
 PROGRAM PASCA SARJANA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMARANG

**TESIS**


PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
 PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI  
 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)  
 DI KELURAHAN MARUNDA KODYA JAKARTA UTARA

**PETA**  
 KONDISI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH  
 DI KELURAHAN MARUNDA

**Legenda**

— Batas Propinsi	— Jalan
- - - Batas Kelurahan	— Sungai
- - - Batas RW	□ Bangunan
— Garis Pantai	

Inset Peta

  
 N  
 Gambar 4.3

Skala Peta  
 0 50 100 200 300 400 Meters

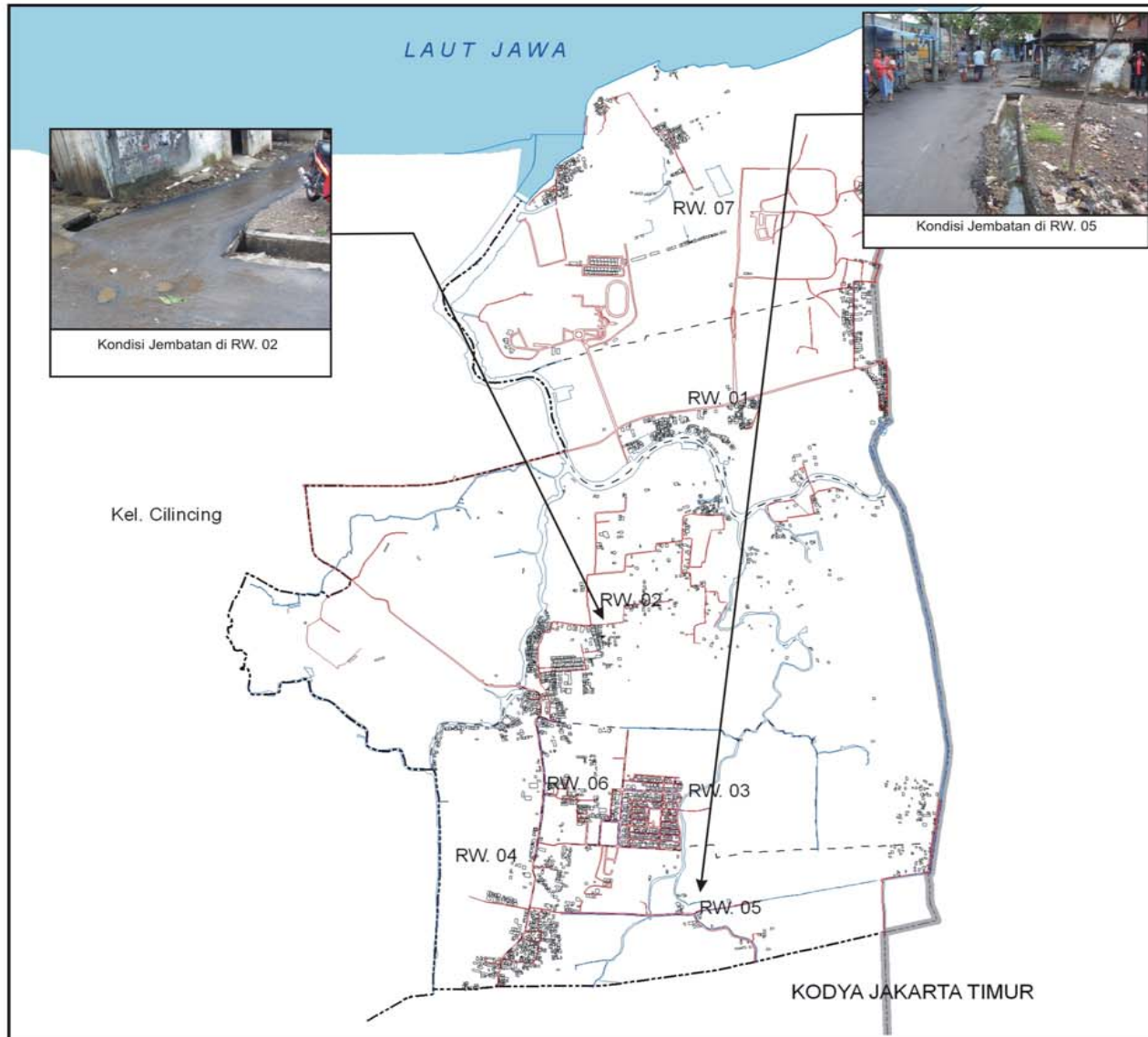
Sumber Peta:  
 Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Dinas Pertanian dan Pemetaan


Namun seperti terlihat dalam gambar, TPS tersebut hampir tidak berisi sampah, dan menurut pengamatan penulis selama berada di lokasi, kebanyakan warga lebih membuang sampah di sembarang tempat. Akibatnya seperti terlihat dalam gambar, tumpukan sampah menjadi pemandangan hampir di sudut Kelurahan Marunda. Hal ini menjadi semakin parah, apabila musim hujan tiba dan rob melanda kawasan ini.

Disamping TPA, dana PPMK yang berkaitan dengan sampah juga, dilakukan dalam bentuk gerobak sampah dan tong sampah seperti yang terlihat dalam gambar. Namun keberadaan gerobak sampah dan tong sampah ini tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat, tetapi merupakan ide dari dewan kelurahan untuk mengadakan pembelian dan ditempatkan sesuai kebutuhan.

#### **4.1.4 Jembatan**

Pengertian jembatan dalam pembahasan ini adalah jembatan yang merupakan bagian dari bangunan pelengkap dari jaringan drainase. Kondisinya masih cukup baik dan hanya terdapat di RW 02 dan RW 05. Jembatan seperti ini memang harus ada sesuai dengan SNI 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan. Berdasarkan SNI 02-2406-1991, disebutkan bahwa pada bagian jaringan drainase harus terdapat bangunan pelengkap yang terdiri dari gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, *street inlet*, pompa dan pintu air. Berikut adalah kondisi jembatan yang dibangun melalui dana PPMK di Kelurahan Marunda:





**MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

---

**TESIS**

---

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)**  
**DI KELURAHAN MARUNDA KODYA JAKARTA UTARA**

---

**PETA**  
**KONDISI JEMBATAN DI KELURAHAN MARUNDA**


---

**Legenda**

— Batas Propinsi	— Jalan
- - - Batas Kelurahan	— Sungai
- - - Batas RW	□ Bangunan
— Garis Pantai	

---

**Inset Peta**





---

N  
**Gambar 4.4**

---

**Skala Peta**




---

Sumber Peta:  
 Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Dinas Pertanahan dan Pemetaan

## 4.2 Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Hasil perhitungan frekuensi selengkapnya tentang kondisi sosial ekonomi berdasarkan sampel di Kelurahan Marunda, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada warga tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 63 orang, sedangkan perempuan sebanyak 37 orang seperti terlihat pada Tabel IV.1.

**TABEL IV.1**  
**FREKUENSI JENIS KELAMIN RESPONDEN**  
**PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**  
**DI KELURAHAN MARUNDA**

No.	Jenis Kelamin Responden	Frekuensi	%
1	Laki-laki	63	63
2	Perempuan	37	37
Jumlah		100	100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tabel di atas, terlihat bahwa jenis kelamin pria sebanyak 63 % dan wanita sebanyak 37%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah partisipan laki-laki lebih banyak dari perempuan. Hal ini disebabkan adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan hak dan

kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno et.al dalam Yulianti (2000:34), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan dengan wanita. Dengan demikian, maka ada kecenderungan kelompok pria lebih banyak berpartisipasi dibanding dengan kelompok wanita.

#### 4.2.2 Usia

Berdasarkan hasil kuesioner, yang penulis kategorikan dalam lima bagian, sehingga diperoleh distribusi usia responden seperti terlihat pada Tabel IV.2.

**TABEL IV.2**  
**FREKUENSI USIA RESPONDEN**  
**PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**  
**DI KELURAHAN MARUNDA**

No.	Usia Responden	Frekuensi	%
1	<20	0	0
2	21 - 30	25	25
3	31 - 40	36	36
4	41 - 50	19	19
5	>51	20	20
Jumlah		100	100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Pada perhitungan distribusi frekuensi usia responden diperoleh informasi bahwa responden yang berusia 31 sampai 40 tahun mendominasi dalam pelaksanaan partisipasi. Dari perhitungan ini terlihat pula bahwa masyarakat yang berpartisipasi tergolong dalam usia produktif. Dari usia produktif ini didominasi oleh usia 31 sampai 40 tahun. Hal ini menunjukkan adanya senioritas dalam berpartisipasi. Perbedaan usia ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas

senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal-hal tertentu misalnya menyalurkan pendapat dan (Soedarno et.al,1992 dalam Yulianti,2000:34), sedang menurut Slamet (1994:142), usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

#### 4.2.3 Pendidikan

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada warga tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, terlihat bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SLTA berjumlah 43 orang, sementara yang paling kecil adalah pada tingkat akademi berjumlah 11 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan ini dapat dilihat pada Tabel IV.3.

**TABEL IV.3**  
**FREKUENSI TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN**  
**PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**  
**DI KELURAHAN MARUNDA**

No.	Tingkat Pendidikan Responden	Frekuensi	%
1	SD	15	15
2	SLTP	16	16
3	SLTA	43	43
4	AKADEMI	12	12
5	PT	14	14
Jumlah		100	100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa presentasi tingkat pendidikan responden paling tinggi adalah SLTA sebanyak 43%, kemudian disusul oleh

SLTP sebanyak 16%, sementara SD dan Akademi mempunyai presentasi yang sama yaitu 11%. Tingkat pendidikan sangat berhubungan dengan pendidikan. Litwin (1986) dalam Yulianti (2000:34) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

#### **4.2.4 Pekerjaan**

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada warga tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, terlihat ada sembilan jenis pekerjaan responden, yang penulis kategorikan seperti dalam tabel. Penjelasan mengenai kategori pekerjaan ini dapat dilihat pada lampiran. Pada tabel terlihat bahwa bahwa jenis pekerjaan responden paling banyak adalah petani/nelayan berjumlah 46 orang, sementara yang paling kecil adalah pedagang/pekerja penjualan berjumlah 2 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pekerjaan ini dapat dilihat pada Tabel IV.4.

**TABEL IV.4**  
**FREKUENSI JENIS PEKERJAAN RESPONDEN**  
**PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**  
**DI KELURAHAN MARUNDA**

No.	Jenis Pekerjaan Responden	Frekuensi	%
1	Petani / Nelayan	46	46
2	Buruh Tani / Nelayan	21	21
3	Usaha Industri	4	4
4	Buruh Industri	0	0
5	Usaha / Pekerja Bangunan	0	0
6	Usaha / Pekerja Angkutan	7	7
7	Pedagang / Pekerja Penjualan	2	2
8	Usaha / Pekerja Jasa	6	6
9	Profesional Tatalaksana	14	14
Jumlah		100	100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa presentasi jenis pekerjaan responden paling tinggi adalah petani/nelayan sebanyak 46%, kemudian disusul oleh buruh tani/nelayan sebanyak 21%, sementara presentasi yang paling rendah adalah pedagang/pekerja penjualan sebanyak 2%. Pekerjaan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

#### **4.2.5 Penghasilan**

Berdasarkan hasil kuesioner, yang penulis kategorikan dalam tiga bagian, sehingga diperoleh distribusi penghasilan responden seperti terlihat pada Tabel IV.5.

**TABEL IV.5**  
**FREKUENSI PENGHASILAN RESPONDEN**  
**PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**  
**DI KELURAHAN MARUNDA**

No.	Penghasilan Responden	Frekuensi	%
1	< Rp 1.000.000	29	29
2	Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000	54	54
3	>Rp 5.000.000	17	17
Jumlah		100	100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Pada perhitungan distribusi frekuensi penghasilan responden diperoleh informasi bahwa responden yang Rp 1.000.000-Rp 5.000.000 per bulan adalah sebanyak 54%. Sedang yang berpenghasilan <Rp 1.000.000 dan Rp >5.000.000 adalah masing-masing 29% dan 17%. Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Barros (1993) dalam Yulianti (2000:34), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju,1999:77-78)

### 4.3 Analisis Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

#### 4.3.1 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan

Dari hasil kuisioner yang disebarakan kepada warga berkaitan dengan berpartisipasi pada tahap perencanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), 26% responden tidak ikut berpartisipasi seperti terlihat pada Tabel VI.6.

Ada beragam alasan responden, sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi, yang pada intinya adalah ketidaktahuan mereka tentang perencanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Menurut Slamet (1992:55) bahwa ada dua faktor yang menyebabkan orang kurang berpartisipasi yaitu karena mereka mengetahui bahwa *final decision* bukan pada mereka tetapi ada pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta karena mereka tidak mempunyai kepentingan khusus yang mempengaruhinya secara langsung.

**TABEL IV.6**  
**KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT BERPARTISIPASI**  
**PADA TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Partisipasi dalam Tahap Perencanaan	Responden	
		Jumlah	%
1	Ikut berpartisipasi	74	74
2	Tidak ikut berpartisipasi	26	26
Total		100	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pada tabel terlihat bahwa responden yang ikut berpartisipasi sebanyak 74%. Tingginya animo responden dalam berpartisipasi, agar warga mampu mengontrol keputusan-keputusan yang mempengaruhi nasib mereka (Slamet,1994:81).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan prasarana lingkungan dapat dilihat dalam Tabel IV.7.

**TABEL IV.7**  
**BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**PADA TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Bentuk Partisipasi dalam Tahap Perencanaan	Responden	
		Jumlah	%
1	Aktif mengikuti pertemuan	44	44
2	Aktif menyampaikan usulan/saran	18	18
3	Terlibat dalam pengambilan keputusan	12	12
4	Tidak ikut berpartisipasi	26	26
Total		100	100

*Sumber: Hasil Analisis, 20097*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa, dari 100 responden pada tahap perencanaan ini, yang aktif berpartisipasi adalah 74 responden. Berdasarkan tabel terlihat bahwa bentuk partisipasi dengan aktif mengikuti pertemuan adalah 44 responden. Ke-44 responden ini adalah mereka yang selalu hadir mengikuti pertemuan dari sekian kali pertemuan diadakan, sementara yang 30 responden tidak mengikuti keseluruhan pertemuan yang diadakan. Dari 44 responden tersebut yang aktif menyampaikan usulan/saran ada 18 responden dan 12 responden yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Tingginya bentuk partisipasi responden ini disebabkan pendapat bahwa kehadiran dalam mengikuti pertemuan di pandang penting dalam tahap perencanaan, karena tanpa kehadiran

seseorang tidak mungkin dapat berpartisipasi di dalam perencanaan (Slamet: 1994:91).

Masyarakat beranggapan merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Conyers,1994:155). Dengan demikian mereka menyadari akan persoalan yang mereka hadapi dan juga potensi yang mereka miliki, dengan demikian berarti mereka bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan, tetapi dalam penelitian ini bentuk partisipasi responden dalam menyampaikan usul/saran dalam pertemuan sangat rendah yaitu 18%.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usul/saran dalam pertemuan oleh Slamet (1994:108) dikemukakan bahwa, hal ini berkaitan dengan tipe kepemimpinan. Menurut Slamet ada tiga kepemimpinan yang mempengaruhi penyampaian usul/saran terkait eksistensi sebuah program yaitu:

1. Kepemimpinan yang bersifat *koordinatif*, yaitu kepemimpinan yang lebih memberikan kemungkinan kepada warga untuk lebih banyak berpartisipasi.
2. Kepemimpinan yang bersifat *oligarcy*, yaitu kepemimpinan dengan sifat terbatas, dimana keputusan-keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan rakyat bersama, tetapi merupakan keputusan dari para *oligarcy*. Hal ini bukan merupakan "*kesalahan*" dari pimpinan tetapi memang keadaan masyarakat sendiri yang memberikan kemungkinan untuk terjadinya sistem tersebut.

3. Kepemimpinan yang bersifat *paternalistis*. Pada tipe kepemimpinan ini bahwa segalanya diserahkan kepada kehendak pimpinan. Keputusan tentang perencanaan pembangunan tidak dicetuskan melalui rapat-rapat, tetapi rakyat sudah menyerahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pimpinan setempat.

Berkaitan dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa rendahnya partisipasi responden pada penelitian ini berhubungan dengan tipe kepemimpinan khususnya kepemimpinan yang bersifat *paternalistis*, dimana kondisi masyarakat di Kelurahan Marunda lebih cenderung menyerahkan perencanaan pembangunan fisik ini kepada pimpinan setempat dalam hal ini, Dewan Kelurahan.

Berdasarkan tabel juga terlihat bahwa hanya 12% masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan prasarana lingkungan melalui PPMK. Hal ini belum memperlihatkan adanya suatu masyarakat yang mandiri yang mampu mengambil keputusan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Menurut Hadi (2001:48) dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.



MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

**TESIS**

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)  
DI KELURAHAN MARUNDA KODYA JAKARTA UTARA

PETA  
PARTISIPASI MASYARAKAT DI  
DI KELURAHAN MARUNDA

**Legenda**

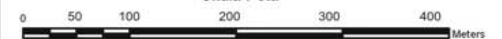
- |                 |          |
|-----------------|----------|
| Batas Propinsi  | Jalan    |
| Batas Kelurahan | Sungai   |
| Batas RW        | Bangunan |
| Garis Pantai    |          |

**Inset Peta**



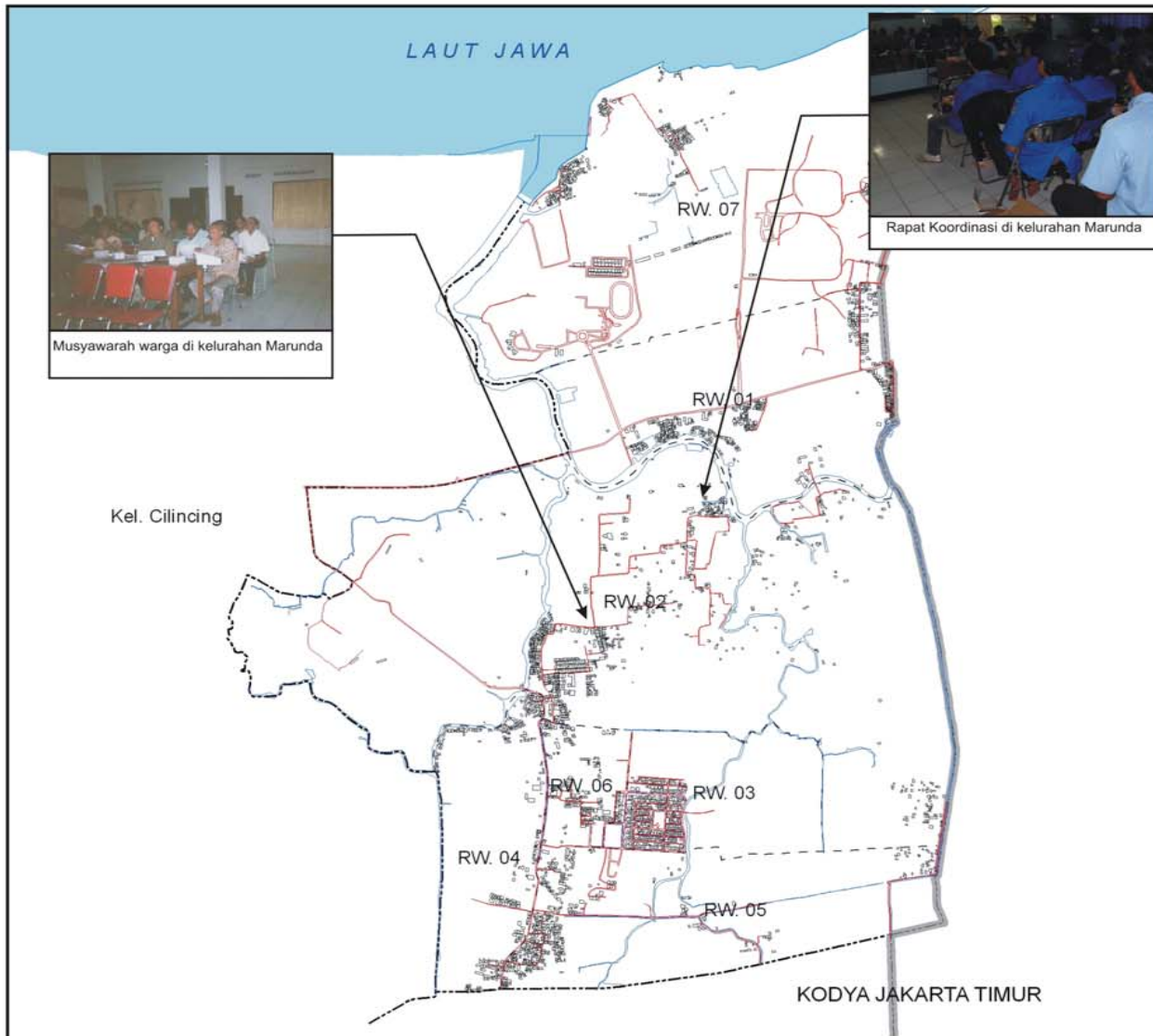
Gambar 4.5

**Skala Peta**



Sumber Peta:

Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Dinas Pertanahan dan Pemetaan



#### 4.3.2 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan

Jawaban dari responden berkaitan dengan pertanyaan apakah ikut berpartisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan mereka, total jawaban menunjukkan bahwa 81% masyarakat terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.8.

**TABEL IV.8**  
**KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT BERPARTISIPASI**  
**PADA TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan	Responden	
		Jumlah	%
1	Ikut berpartisipasi	81	81
2	Tidak ikut berpartisipasi	19	19
Total		100	100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Bila dibandingkan dengan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan yang hanya 74%, maka pada tahap pelaksanaan, keikutsertaan responden meningkat (81%). Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa, jika pada tahap perencanaan adalah urusan bagi yang warga yang terpilih dan duduk sebagai dewan kelurahan.

Keberadaan dewan kelurahan ini adalah merupakan instrumen hukum pelaksanaan PPMK yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, khususnya pasal 27 mengenai keberadaan Dewan Kelurahan sebagai mitra pemerintah kelurahan, yang mempunyai tugas untuk menampung aspirasi warga kelurahan, memberikan

usul dan saran kepada lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, menjelaskan kebijakan pemerintah kelurahan kepada warga kelurahan, membantu lurah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang Dewan Kelurahan.

Sedang pada tahap pelaksanaan, warga masyarakat beranggapan bahwa, siapapun boleh terlibat, apalagi prasarana yang dibangun berada di lingkungan permukiman warga. Senada dengan hal ini, Ericson (dalam Slamet,1994:89) mengatakan bahwa partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*) dimaksudkan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau pun material sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut.

Bentuk peran serta masyarakat yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan kelurahan dengan pemanfaatan dana PPMK, berdasarkan hasil jawaban para responden diketahui bahwa 60% responden memberikan dalam bentuk tenaga, 1% dalam bentuk uang, 8% dalam bentuk material, 7% dalam bentuk pikiran dan 6% dalam bentuk keahlian. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel IV.9.

Seperti telah dijelaskan pada tabel sebelumnya bahwa dari 100 responden yang ikut berpartisipasi pada tahap pelaksanaan ini adalah sebanyak 81 responden. Dari 81 responden tersebut, yang ikut berpartisipasi dalam bentuk uang hanya 1 responden seperti terlihat pada tabel diatas. Sementara responden lain dalam bentuk yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan dari warga bahwa

pembangunan prasarana yang berasal dari pemerintah biasanya hibah atau warga tidak perlu membayar apapun.

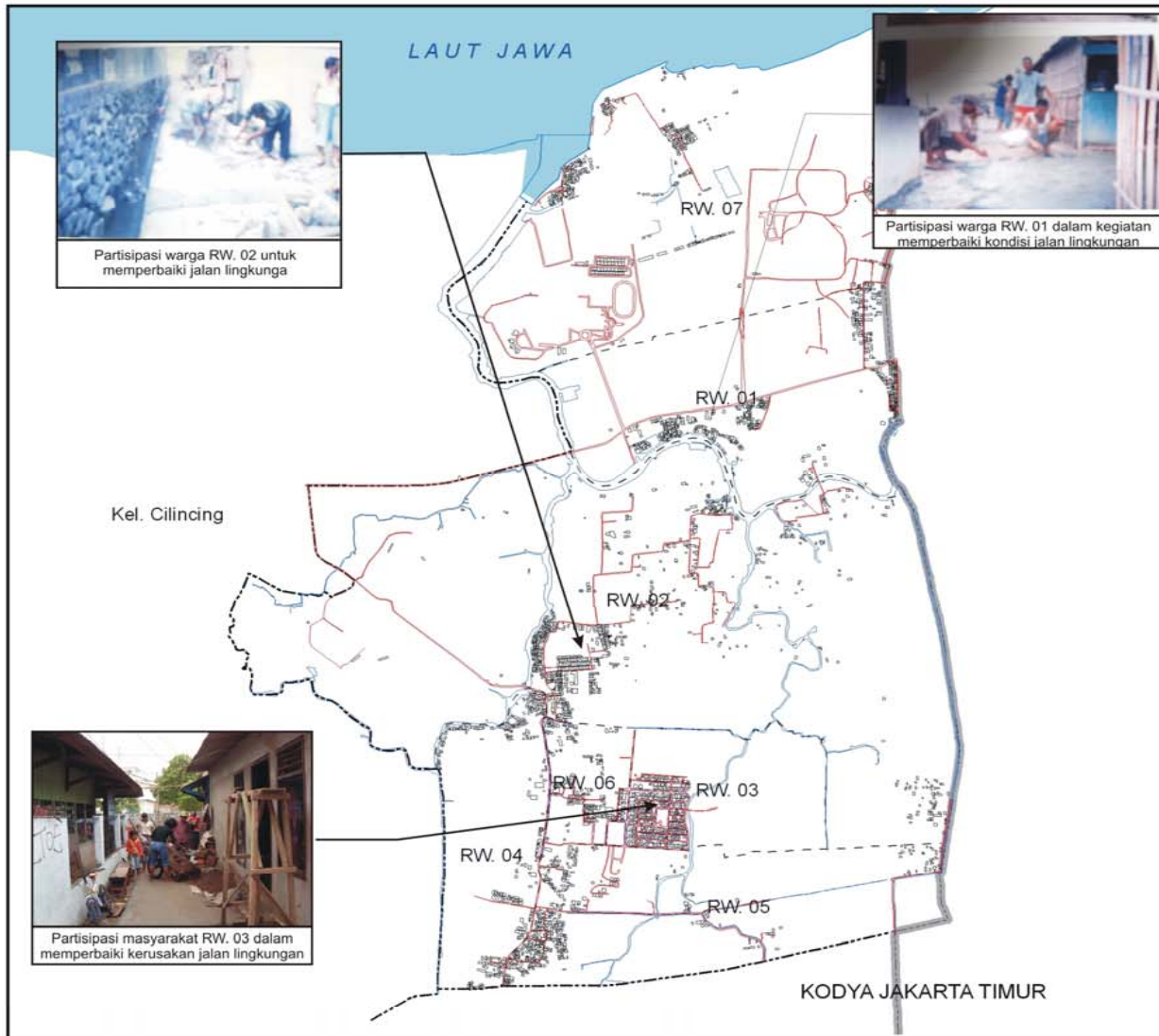
**TABEL IV.9**  
**BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP**  
**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Bentuk Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan	Responden	
		Jumlah	%
1	Tenaga	60	60
2	Uang	1	1
3	Material	8	8
4	Pikiran	7	7
5	Keahlian	6	6
6	Tidak ikut berpartisipasi	18	18
Total		100	100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Terlepas dari bentuk partisipasi yang diberikan, pada tahap perencanaan ini, antusiasme warga untuk berpartisipasi sangat tinggi. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan menunjukkan bahwa dana yang berasal dari bantuan langsung telah benar-benar bersifat dan berfungsi stimulan, sehingga memotivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi, yang menurut Peter M. Blau (Kusnaedi, 1995:48) bahwa semakin banyak manfaat yang diduga masyarakat maka semakin kuat pula masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan warga pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan di Kelurahan Marunda:









  
**MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

**TESIS**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN MELALUI**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)**  
**DI KELURAHAN MARUNDA KODYA JAKARTA UTARA**

PETA  
 PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN  
 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN MARUNDA


**Legenda**

 Batas Propinsi	 Jalan
 Batas Kelurahan	 Sungai
 Batas RW	 Bangunan
 Garis Pantai	

Inset Peta



  
 Gambar 4.6

**Skala Peta**  


Sumber Peta:  
 Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Dinas Pertanahan dan Perencanaan

### 4.3.3 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pengawasan

Dengan dilakukannya perencanaan serta pelaksanaan oleh masyarakat, diharapkan pengawasan/monitoringnya pun akan dilakukan juga oleh masyarakat sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai keinginan masyarakat. Kegiatan pada tahapan monitoring ini penting sekali untuk memandu apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan model (*blue print*) yang telah ditetapkan (Soekartawi,1990:105).

Jawaban dari responden berkaitan dengan keaktifan mereka melakukan pengawasan kegiatan pembangunan prasarana kelurahan didapat data 83% responden cukup aktif sedang jumlah responden yang tidak aktif sebanyak 17%.

**TABEL IV.10**  
**KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT BERPARTISIPASI**  
**PADA TAHAP PENGAWASAN PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan	Responden	
		Jumlah	%
1	Ikut berpartisipasi	83	83
2	Tidak ikut berpartisipasi	17	17
Total		100	100

*Sumber : Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan tabel terlihat bahwa responden yang aktif berpartisipasi, meningkat lagi (83%), dibanding pada tahap perencanaan (74%) dan pada tahap pelaksanaan (81%). Peningkatan ini disebabkan adanya rasa kepemilikan masyarakat terhadap prasarana lingkungan yang dibangun di lingkungan tempat tinggal mereka.

Pada tabel juga terlihat bahwa yang tidak aktif mengawasi/memonitor jalannya pembangunan prasarana beralasan bahwa pengawasan pelaksanaan

pembangunan adalah bukan tugas mereka dan hal itu merupakan tugas pihak-pihak terkait, yang menurut Soekartawi (1990:103) monitoring biasanya dilakukan oleh oleh suatu tim di luar dari anggota pelaksana proyek. Maksudnya, agar monitoring tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaruh dari yang melaksanakan proyek. Alasan lainnya adalah berkaitan dengan pekerjaan masyarakat, dimana seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi (Plunner dalam Adib,2004:27).

Sementara bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan prasarana lingkungan dapat dilihat dalam Tabel IV.11.

**TABEL IV.11**  
**BENTUK PARTISIPASI RESPONDEN**  
**PADA TAHAP PENGAWASAN PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Bentuk Partisipasi dalam Tahap Pengawasan	Responden	
		Jumlah	%
1	Kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana	8	8
2	Daya guna	21	21
3	Hasil guna	54	54
4	Tidak ikut berpartisipasi	17	17
Total		100	100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana sangat rendah yaitu 8%. Penentuan jenis atau bentuk prasarana dan lokasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang dihimpun dan ditetapkan melalui mekanisme yang ada pada masyarakat, namun dengan dana PPMK yang terbatas tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua usulan dari

warga. Sehingga wajar bila ada jawaban dari responden yang merasa jenis dan lokasi parasarana yang dibangun atau diperbaiki dengan memanfaatkan dana PPMK tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Conyers (1994:189) yang menyatakan bahwa memang skala prioritas masyarakat mungkin saja sangat berbeda dari skala prioritas yang dimiliki oleh perencana itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pula bahwa 21% dan 54% responden telah merasakan daya guna dan hasil guna dari hasil pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan di lingkungan masing-masing. Menurut Ericson dalam Slamet (1994:89) partisipasi pada tahap pemanfaatan ini (*utilitazion stage*) maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahapan pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Sikap apatis masyarakat terlihat pada tahap ini jika mereka belum mau berpartisipasi sejak tahap pertama hingga tahap ketiga ini.

#### **4.3.4 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK)**

Menurut Sherry Arnstein pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul “A Ladder of Citizen Participation”, (1969:217) bahwa terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan.

Partisipasi masyarakat pada jenjang tertinggi adalah partisipasi masyarakat yang benar-benar memberikan otoritas pada komunitas atau masyarakat. Sementara partisipasi masyarakat pada jenjang terendah adalah partisipasi

masyarakat yang dilakukan sekedar sebagai proses manipulasi atau mengelabui. Sebagaimana dikatakan Arnstein, terdapat apa yang ia sebut sebagai “ *ladder of citizen participation*” atau tangga partisipasi masyarakat.

Berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat tersebut, maka dalam analisis tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), akan disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam program ini yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi melalui kuesioner yang telah didesain oleh peneliti (seperti terlampir), dan hasilnya seperti tersaji dalam Tabel IV.12.

Berdasarkan tabel diperoleh informasi bahwa, pendapat responden tentang tentang keikutsertaan mereka dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), semua berada diatas 50%. Tingginya keikutsertaan responden dalam pembangunan ini cukup berasal, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, ketika responden ditanya tentang bentuk partisipasi responden, partisipasi responden juga tinggi, pada tahap perencanaan keikutsertaan responden dalam bentuk partisipasi adalah 74%, pada tahap pelaksanaan, keikutsertaan responden adalah 81%, dan pada tahap pengawasan sebanyak 83%.

Untuk menganalisis tingkat partisipasi responden dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), maka penulis merujuk kepada pendapat Sherry Arnstein pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners*

dengan judul “*A Ladder of Citizen Participation*”, bahwa terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan.

**TABEL IV.12**  
**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KEIKUTSERTAAN**  
**MEREKA DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Pendapat Responden dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan	Responden	
		Frekuensi	%
1	Persetujuan Program		
	a. Ya	71	71
	b. Tidak	29	29
2	Perlakuan yang sama terhadap warga oleh pemerintah pada saat rapat terkait program		
	a. Ya	77	77
	b. Tidak	23	23
3.	Mendapatkan informasi, tanpa pemberian kesempatan dari pemerintah untuk bertanya atau memberikan saran terkait program		
	a. Ya	72	72
	b. Tidak	28	28
4	Melakukan tanya jawab dengan pemerintah mengenai program		
	a. Ya	72	72
	b. Tidak	28	28
5	Pemberian saran terkait program		
	a. Ya	66	66
	b. Tidak	34	34
6	Negosiasi (tawar-menawar) mengenai program		
	a. Ya	63	63
	b. Tidak	37	37
7	Pemberian limpahan kewenangan dari pemerintah untuk membuat keputusan dominan		
	a. Ya	61	61
	b. Tidak	39	39
8	Pemberian kekuasaan penuh oleh pemerintah terkait program		
	a. Ya	67	67
	b. Tidak	33	33

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan tabel terlihat bahwa pendapat responden pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Marunda adalah berada pada *tingkat therapy*. Tingkatan ini adalah merupakan *tingkatan terendah* (manipulasi dan therapy), dimana pada tingkat ini

masyarakat hanya ramai-ramai diikutsertakan dalam kegiatan tanpa diberi wewenang untuk menolak atau memberi saran, dan tanpa tahu keuntungan apa bagi mereka (*non-participation*).

Selain itu pada tingkat ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan hanya berkedok melibatkan masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat pada kegiatan, meskipun kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

#### **4.4 Analisis Hubungan Sosial Ekonomi terhadap Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)**

Sebelum melakukan uji statistik tentang hubungan sosial ekonomi, maka akan dijelaskan terdahulu, perbandingan antara kondisi sosial ekonomi dengan tahap-tahap pada pembangunan prasarana lingkungan di Kelurahan Marunda Jakarta Utara sebagai berikut:

##### **4.4.1 Perbandingan Jenis Kelamin Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan**

Pada Tabel VI.13, akan ditunjukkan perbandingan jenis kelamin responden pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan seperti berikut:

**TABEL IV.13**  
**PERBANDINGAN JENIS KELAMIN RESPONDEN DENGAN BENTUK**  
**PARTISIPASI PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Bentuk Partisipasi	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
<i>Tahap Perencanaan</i>				
1	Aktif mengikuti pertemuan	29	15	44
2	Aktif menyampaikan usulan/saran	12	6	18
3	Terlibat dalam pengambilan keputusan	7	6	13
4	Tidak memberikan pilihan	15	10	25
Jumlah		63	37	100
<i>Tahap Pelaksanaan</i>				
1	Tenaga	38	22	60
2	Uang	0	1	1
3	Material	5	3	8
4	Pikiran	6	1	7
5	Keahlian	3	3	6
6	Tidak memberikan pilihan	11	7	18
Jumlah		63	37	100
<i>Tahap Pengawasan</i>				
1	Kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana	8	0	8
2	Daya guna	10	11	22
3	Hasil guna	33	21	54
4	Tidak memberikan pilihan	12	5	17
Jumlah		63	37	100

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan tabel diperoleh informasi, bahwa dari ketiga tahapan pembangunan prasarana lingkungan beserta bentuk partisipasi yang dilakukan, jenis kelamin laki-laki mendominasi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini cukup beralasan karena partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antar pria dan wanita. Menurut Soedarno et.al (1992) dalam Yulianti (2000:34), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi.

#### 4.4.2 Perbandingan Usia Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan

Pada Tabel VI.14, akan ditunjukkan perbandingan usia responden pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan seperti berikut:

**TABEL IV.14**  
**PERBANDINGAN USIA RESPONDEN DENGAN BENTUK PARTISIPASI**  
**PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Bentuk Partisipasi	Usia					Total
		<20	21-30	31-40	41-50	>50	
<i>Tahap Perencanaan</i>							
1	Aktif mengikuti pertemuan	0	12	17	6	9	44
2	Aktif menyampaikan usulan/saran	0	4	5	5	4	18
3	Terlibat dalam pengambilan keputusan	0	1	6	2	4	13
4	Tidak memberikan pilihan	0	8	8	6	3	25
Jumlah		0	25	36	19	20	100
<i>Tahap Pelaksanaan</i>							
1	Tenaga	0	13	19	11	17	60
2	Uang	0	1	0	0	0	1
3	Material	0	0	5	3	0	8
4	Pikiran	0	2	3	1	1	7
5	Keahlian	0	2	4	0	0	8
6	Tidak memberikan pilihan	0	7	5	4	2	18
Jumlah		0	25	36	19	20	100
<i>Tahap Pengawasan</i>							
1	Kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana	0	1	2	3	2	8
2	Daya guna	0	3	9	4	5	21
3	Hasil guna	0	14	21	10	9	54
4	Tidak memberikan pilihan	0	7	4	2	4	17
Jumlah		0	25	36	19	20	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa usia 31-40 tahun mendominasi pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, baik dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan maupun dari jumlah keseluruhan responden. Usia tersebut merupakan usia produktif. Penduduk usia produktif secara rill berarti penduduk produktif yang pada umumnya masuk dalam kelompok telah bersiap bekerja atau bisa bekerja, dimana pada usia ini sangat berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet,1994:142).

#### 4.4.3 Perbandingan Tingkat Pendidikan Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan

Perbandingan tingkat pendidikan responden pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan akan disajikan pada Tabel IV.15 seperti berikut:

**TABEL IV.15**  
**PERBANDINGAN TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN**  
**DENGAN BENTUK PARTISIPASI PADA PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Bentuk Partisipasi	Tingkat Pendidikan					Total
		SD	SLTP	SLTA	AKADEMI	PT	
<i>Tahap Perencanaan</i>							
1	Aktif mengikuti pertemuan	7	8	18	4	7	44
2	Aktif menyampaikan usulan/saran	2	3	6	4	3	18
3	Terlibat dalam pengambilan keputusan	0	1	9	1	2	13
4	Tidak memberikan pilihan	6	4	10	3	2	25
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>100</b>
<i>Tahap Pelaksanaan</i>							
1	Tenaga	8	9	24	8	11	60
2	Uang	1	0	0	0	0	1
3	Material	0	0	6	2	0	8
4	Pikiran	2	0	4	0	1	7
5	Keahlian	1	2	2	1	0	8
6	Tidak memberikan pilihan	3	5	7	1	2	18
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
<i>Tahap Pengawasan</i>							
1	Kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana	1	0	3	3	1	8
2	Daya guna	2	1	12	2	4	21
3	Hasil guna	9	10	22	7	6	54
4	Tidak memberikan pilihan	3	5	6	0	3	17
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Dari tabel tabel diperoleh informasi bahwa, tingkat pendidikan responden yang paling banyak memberikan bentuk partisipasi, baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan adalah SLTA. Juga terlihat bahwa tingkat pendidikan responden yang tidak memberikan bentuk partisipasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, paling tinggi adalah SLTA. Disini

menunjukkan bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan (Litwin dalam Yulianti,2000:34).

Hal ini akan semakin berpengaruh jika mereka dilibatkan memberi sumbangan pikiran dan gagasan yang membuat mereka merasa berharga dan memiliki harga diri di depan sesama temannya.

#### **4.4.4 Perbandingan Pekerjaan Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan**

Perbandingan partisipasi terhadap pekerjaan responden pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan, akan disajikan pada Tabel IV.16. Pekerjaan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

**TABEL IV.16**  
**PERBANDINGAN PEKERJAAN RESPONDEN DENGAN BENTUK PARTISIPASI PADA PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Bentuk Partisipasi	Pekerjaan									Total
		Petani/ Nelayan	Buruh Tani/ Nelayan	Usaha Industri	Buruh Industri	Usaha/Pekerja Bangunan	Usaha/Pekerja Angkutan	Pedagang/Pekerja Penjualan	Usaha/Pekerja Jasa	Profesional Tata Laksana	
<i>Tahap Perencanaan</i>											
1	Aktif mengikuti pertemuan	20	11	2	0	0	4	0	2	5	44
2	Aktif menyampaikan usulan/saran	5	4	1	0	0	1	1	1	5	18
3	Terlibat dalam pengambilan keputusan	11	1	0		0	0	0	0	1	13
4	Tidak memberikan pilihan	10	5	1	0	0	2	1	3	3	25
Jumlah		46	21	4	0	0	7	2	6	14	100
<i>Tahap Pelaksanaan</i>											
1	Tenaga	30	10	3	0	0	3	1	3	10	60
2	Uang	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Material	4	2	0	0	0	0	1	0	1	8
4	Pikiran	4	1	0	0	0	0	0	1	1	7
5	Keahlian	0	4	1	0	0	1	0	0	0	6
6	Tidak memberikan pilihan	8	3	0	0	0	3	0	2	2	18
Jumlah		46	21	4	0	0	7	2	6	14	100
<i>Tahap Pengawasan</i>											
1	Kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana	4	1	1	0	0	0	1	0	1	8
2	Daya guna	12	4	0	0	0	0	0	0	5	21
3	Hasil guna	23	13	3	0	0	4	1	4	6	54
4	Tidak memberikan pilihan	7	3	0	0	0	3	0	2	2	17
Jumlah		46	21	4	0	0	7	2	6	14	100

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Berdasarkan tabel terlihat bahwa jenis pekerjaan responden yang paling banyak memberikan bentuk partisipasi, baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan adalah petani/nelayan. Juga terlihat bahwa jenis pekerjaan responden yang tidak memberikan bentuk partisipasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, paling tinggi adalah petani/nelayan.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Penulis juga berpendapat bahwa karena banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh petani/nelayan, menyebabkan mereka selalu berkesempatan untuk hadir pada saat pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan prasarana lingkungan.

#### **4.4.5 Perbandingan Penghasilan Responden pada Tahap Pembangunan Prasarana Lingkungan**

Perbandingan partisipasi terhadap pekerjaan responden pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan, akan disajikan pada Tabel IV.17. Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Barros (1993) dalam Yulianti (2000:34), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 1999:77-78)

**TABEL IV.17**  
**PERBANDINGAN PENGHASILAN RESPONDEN DENGAN BENTUK PARTISIPASI**  
**PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN**

No.	Bentuk Partisipasi	Penghasilan			Total
		< Rp	Rp 1.000.000-	> Rp	

		1.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	
<b>Tahap Perencanaan</b>					
1	Aktif mengikuti pertemuan	14	20	10	44
2	Aktif menyampaikan usulan/saran	5	11	2	18
3	Terlibat dalam pengambilan keputusan	5	9	2	13
4	Tidak memberikan pilihan	8	14	3	25
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>100</b>
<b>Tahap Pelaksanaan</b>					
1	Tenaga	15	32	13	60
2	Uang	1	0	0	1
3	Material	2	6	0	8
4	Pikiran	3	4	0	7
5	Keahlian	3	2	1	6
6	Tidak memberikan pilihan	5	10	3	18
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>100</b>
<b>Tahap Pengawasan</b>					
1	Kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana	1	5	2	8
2	Daya guna	3	14	4	21
3	Hasil guna	19	26	9	54
4	Tidak memberikan pilihan	6	9	2	17
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Da  
ri  
tabel  
terlihat  
bahwa  
penghasilan  
responden  
yang paling

banyak memberikan bentuk partisipasi, baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan adalah mereka yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000-Rp 5.000.000. Demikian pula responden yang tidak memberikan bentuk partisipasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, adalah mereka yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000-Rp 5.000.000.

#### 4.4.6 Analisis Hubungan Sosial Ekonomi terhadap Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan Prasarana Lingkungan

Untuk mengetahui hubungan ini, dari hasil survei di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan model tabulasi silang. Tabulasi silang adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih dengan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya. Data dari tiap variabel dikelompokkan dalam beberapa kategori, dimana dari setiap kategori tersebut diberi skor untuk mempermudah perhitungan.

Berikut adalah hasil uji statistik (*proses perhitungan terlampir, lampiran E,F,G*) hubungan sosial ekonomi dengan bentuk partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Marunda, dengan ketentuan: *Jika  $X^2$  hitung <  $X^2$  tabel (df k-1 x k-1) = 2, H<sub>0</sub> : diterima; dan Jika  $X^2$  hitung >  $X^2$  tabel (df k-1 x k-1) = 2, H<sub>1</sub>: diterima (H<sub>0</sub> ditolak), pada tingkat kepercayaan 95%=5,991.*

**TABEL IV.18**  
**HUBUNGAN BENTUK PARTISIPASI RESPONDEN**  
**DENGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PADA TAHAPAN PEMBANGUNAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN**

NO.	BENTUK PARTISIPASI PADA PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN	NILAI $X^2$ KONDISI SOSIAL EKONOMI RESPONDEN					NILAI $X^2$ TABEL
		Jenis Kelamin	Usia	Tingkat pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	
1	Tahap Perencanaan (keaktifan warga mengikuti pertemuan, menyampaikan usulan/saran, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan)	0,827	19,212	21,224	31,151	3,983	5,991
2	Tahap Pelaksanaan (tenaga, uang, material, pikiran dan keahlian)	3,718	19,212	21,224	31,151	8,683	5,991
3	Tahap Pengawasan (kesesuaian prasarana dengan rencana, daya guna dan hasil guna)	7,332	7,239	14,430	19,426	4,971	5,991

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahap perencanaan, nilai  $X^2$  hitung usia (19,212), tingkat pendidikan (21,224), dan pekerjaan (31,151) lebih besar dari nilai  $X^2$  tabel (5,991). Dengan demikian diketahui bahwa terdapat hubungan antara bentuk partisipasi dengan kondisi sosial ekonomi responden pada tahap perencanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yaitu usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Dengan kata lain, faktor yang paling mempengaruhi bentuk partisipasi responden pada tahap perencanaan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah *usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan*.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), setelah diuji statistik, hasilnya dapat diketahui bahwa nilai  $X^2$  hitung usia (19,212), tingkat pendidikan (21,224), pekerjaan (31,151) dan penghasilan (8,683) lebih besar dari nilai  $X^2$  tabel (5,991). Jadi terdapat hubungan antara bentuk partisipasi responden dengan kondisi sosial ekonomi. Dengan kata lain, bahwa ada pengaruh bentuk partisipasi responden dengan kondisi sosial ekonomi pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yaitu *usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan*.

Pada tahap pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), diketahui bahwa nilai  $X^2$  hitung jenis kelamin (7,332), usia (19,212), tingkat pendidikan (21,224), dan pekerjaan (31,151) lebih besar dari nilai  $X^2$  tabel (5,991). Dengan demikian terdapat hubungan antara bentuk partisipasi responden dengan kondisi sosial ekonomi. Dengan kata lain, bahwa ada pengaruh bentuk partisipasi responden dengan kondisi sosial ekonomi pada tahap pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yaitu *jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan*.

#### **4.5 Analisis Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap faktor ini, telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi cukup besar. Dari 100 responden pada saat perencanaan, yang ikut berpartisipasi sebanyak 74 responden, meningkat menjadi 81 responden pada tahap pelaksanaan. Hal ini disebabkan adanya tanggapan masyarakat bahwa siapapun boleh terlibat dalam pelaksanaan, apalagi prasarana yang dibangun berada di lingkungan permukiman warga.

Sesuai dengan hal tersebut, Ericson (dalam Slamet, 1994:89) mengatakan bahwa partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*) dimaksudkan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau pun material sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut.

Pada tahap pengawasan, warga yang ikut berpartisipasi meningkat menjadi 83 responden. Peningkatan ini disebabkan adanya rasa kepemilikan masyarakat terhadap prasarana lingkungan yang dibangun di lingkungan tempat tinggal mereka.

Namun hasil yang berbeda tatkala responden ditanya tentang keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, khususnya terkait dengan pembangunan prasarana lingkungan, hasil yang diperoleh belum seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti bahwa dari beberapa pertanyaan terbuka yang diajukan kepada responden tentang ketidakikutsertaan mereka berpartisipasi, mayoritas responden menjawab, bahwa mereka bukan pengurus yang tergabung dalam program ini. Selain itu dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden, yang merujuk kepada pendapat Sherry Arnstein pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul “*A Ladder of Citizen Participation*”, tentang tangga tingkat partisipasi masyarakat, diperoleh informasi bahwa tingkat partisipasi responden pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Marunda adalah berada pada tingkat *therapy*. Tingkatan ini adalah merupakan *tingkatan terendah* (manipulasi dan terapi), dimana pada tingkat ini masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan tanpa diberi wewenang untuk menolak atau memberi saran, dan tanpa tahu keuntungan apa bagi mereka (*non-participation*).

Selain itu pada tingkat ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan hanya berkedok melibatkan masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat pada kegiatan, namun kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah. Padahal Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dianggap oleh banyak kalangan merupakan terobosan jitu yang secara langsung memanfaatkan institusi masyarakat di tingkat kelurahan-kelurahan, yaitu dengan secara langsung mengambil basis masyarakat Rukun Warga (RW) dan masyarakat Rukun Tetangga (RT).

Oleh banyak kalangan, program ini juga dinilai sebagai sebuah langkah maju dan bijak yang diambil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyikapi perubahan-perubahan otonomi. Secara khusus program ini menyikapi Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta, yaitu dengan

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001, dengan membentuk suatu Dewan Kelurahan atau disingkat DK atau Dekel. Dekel ini ditugasi menampung program dan kegiatan yang ada pada tingkat kelurahan.

Pembentukan Dekel dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Pembentukan Dekel juga merupakan pertanda kepercayaan dari Pemda DKI Jakarta kepada masyarakat dengan menyerahkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dibiayai lewat APBD DKI Jakarta langsung kepada masyarakat di tingkat RT/RW tersebut. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk merumuskan program dan kegiatan sendiri pada tingkat RT/RW melalui berbagai proposal atau cara-cara lain yang diatur sendiri oleh masyarakat.

Terlihat sangat ironis, dan contoh kasus ini sekaligus menunjukkan sangat dominannya *top-down policy* pemerintah dalam pembangunan. Jika saja partisipasi masyarakat dioptimalkan keterlibatannya sejak awal perencanaan dan pelaksanaan program, serta institusi pemerintah terkait dilibatkan secara benar, maka hampir dapat dipastikan upaya-upaya tersebut akan membuahkan hasil yang lebih baik serta mendekati sasaran yang diharapkan.

Uraian diatas, adalah merupakan pendapat responden tentang tingkat partisipasi terhadap program PPMK, yang berada di tingkat *therapy*, namun jika dilihat dari keikutsertaan responden pada setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa responden sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program PPMK.

Menurut Sherry Arnstein, indikasi adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat *kemitraan (partnership)*, dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat dimana

pemimpin-pemimpinnya akuntabel, pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka, ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer (community organizer) mereka sendiri.

Berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan kondisi sosial ekonomi, dapat diketahui karakteristik responden di kelurahan Marunda Jakarta Utara. Dari 100 responden, terlihat bahwa untuk gender, lebih didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 63 responden, pada usia, didominasi oleh usia 31-40 tahun sebanyak 36 responden. Untuk tingkat pendidikan, didominasi oleh SLTA sebanyak 43 responden, dan pekerjaan didominasi oleh petani/nelayan sebanyak 46 responden, serta penghasilan didominasi oleh responden yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000-Rp 5.000.000. Disini terlihat bahwa belum adanya optimasiasi pelibatan seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi tanpa memandang kondisi sosial ekonomi, padahal proses pelibatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam implementasi program pembangunan, terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesadaran masyarakat.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat di bidang pembangunan mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses tersebut, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (*bottom up*), dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan. Hal ini dipertegas oleh Eldridge (1995:17) "*participation means a shift in decision making power from more powerful to poor, disadvantages, and less influential groups.*" Keberdayaan rakyat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering hanya dipandang sebagai suatu pendekatan (*approach*) dan bukan sebagai tujuan (*objective*) (Rifkin,1988:931-940). Sebagai pendekatan maka partisipasi masyarakat hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu (*as a means*). Keadaan ini menyebabkan partisipasi masyarakat acapkali diterjemahkan hanya

sebagai kontribusi tenaga dan finansial masyarakat dalam program pembangunan, sehingga keterlibatan masyarakat dianggap terbatas hanya dalam tahap implementasi/pelaksanaan program saja. Segala bentuk perencanaan dan pengambilan keputusan awal telah dilakukan di tingkat yang lebih atas, sehingga masyarakat hanya tinggal melaksanakannya saja. Dengan demikian, kesempatan masyarakat untuk dapat berkontribusi pada program tersebut hanya tersisa pada bentuk kontribusi finansial dan tenaga kerja pada tataran implementasi.

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan kajian terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara, menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi cukup besar, hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dan pemberian bentuk partisipasi yang semakin meningkat dalam setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Namun keikutsertaan masyarakat ini masih didominasi oleh kondisi sosial ekonomi tertentu.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan menurut teori Sherry Arnstein yang disesuaikan dengan keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) berada pada *tingkat therapy*, dimana pada tingkat ini masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan tanpa diberi wewenang untuk menolak atau memberi saran, dan tanpa tahu keuntungan apa bagi mereka (non-participation). Namun jika dilihat dari keikutsertaan responden pada setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa responden sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program PPMK. Indikasi adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat *kemitraan (partnership)*, dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah.

Keaktifan masyarakat untuk mewujudkan bentuk partisipasi dalam perencanaan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan dalam menghadiri dan mengajukan usul atau saran pada pertemuan-pertemuan yang membahas perencanaan pembangunan prasarana lingkungan. Keaktifan masyarakat dalam peran perencanaan tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk mempunyai prasarana baru ataupun memperbaiki prasarana yang telah rusak di lingkungan mereka. Begitu pula pada tahap pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan antusiasme keterlibatan masyarakat pada memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk. Pada tahap pengawasan, keaktifan masyarakat untuk mewujudkan bentuk partisipasi juga tinggi, dikarenakan adanya tanggung jawab dari mereka sendiri untuk menyelaraskan antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga sesuai dengan harapan masyarakat, serta banyaknya manfaat yang mereka peroleh.

Berdasarkan pengujian bentuk partisipasi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi diketahui bahwa:

- a. Pada tahap perencanaan, bentuk partisipasi dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan;
- b. Pada tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan;
- c. Pada tahap pengawasan, bentuk partisipasi dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

## **5.2 Rekomendasi**

1. Pemerintah hendaknya berusaha untuk melibatkan seluruh masyarakat, dalam pelaksanaan program-program kerja yang telah diciptakan dalam hal ini PPMK, tanpa memandang perbedaan kondisi ekonomi sosial di masyarakat.
2. Untuk lebih meningkatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui PPMK, pemerintah setempat

hendaknya memberikan pelatihan, penyuluhan atau peningkatan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat merasa benar-benar terlibat dalam program ini.

3. Perlunya peningkatan intensitas sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) oleh pemerintah, agar program ini berada pada tingkat kemitraan (*partnership*), dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
4. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dapat dilakukan lewat peningkatan pembinaan melalui penyuluhan, dan pemerintah perlu berinisiatif untuk meningkatkan kualitas seluruh *stakeholder* dalam setiap tahap pembangunan, termasuk pemerintah sendiri, karena dengan kualitas yang setara diantara para stakeholder akan menghindari konflik karena kepentingan individu maupun golongan.
5. Sedangkan rekomendasi atau saran untuk peneliti selanjutnya adalah perlu dikaji lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat dari partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Burke, M.Edmun. 2004. *Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Kota*. Terjemahan Puji Lestari, Bandung: Yayasan Sugijanto Soegijoko Indonesia.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Terjemahan Susetiawan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Clark, John. 1995. *The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector*. World Development 23, No. 4.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment—The Politics Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers
- Handayani, Suci. 2006. *Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif (Sebuah Pengalaman di Kota Solo)*. Solo: Kompip.
- Jayadinata, Johara T, 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB Bandung
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Korten, David C. 1984. *People Centered Development Contributions Toward Theory and Planning Frameworks*, terjemahan A. Setiawan Abadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Latief, M Syahbudin dan Suryatiningsih. 1994. *Beberapa Kendala Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dalam Mubyarto, dkk, 1994, Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Levy, John M. 1997. *Contemporary Urban Planning*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Nasution, S. 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Numandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa.
- Panudju, Bambang .1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni
- Purba, Jonny (ed).2005. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pradhanawati, Ari. 2005. *Pengembangan Pembangunan Masyarakat*. MTPWK Undip - Departemen Pekerjaan Umum
- Rifkin, SB; F. Muller; W. Bichman. 1988. *Primary Health Care: on Measuring Participation. Social Science and Medicine*. 26(9): 931-940
- Santoso, Gempur. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sumodiningrat, Gunawan.1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah 123 Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT AlexMedia Komputindo Kelompok Gramedia
- Subyantoro, Arief dan FX. Suwarto.2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset
- Suparlan, Parsudi (ed).1993. *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suripin. 2004. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Sutoro, Eko (ed). 2005. *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta: APMD Press
- Soegijoko dan Kusbiantoro.1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.

Soetomo.2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar  
 Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

## ARTIKEL

### Jurnal

Alit, I Ketut, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman di Propinsi Bali*, Jurnal Permukiman Natak, Vol.3, Nomor 1, Februari, hal. 1-61  
 Suciati, et al, 2007, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol.2, Nomor 9, Agustus, hal.26-43  
 Sunarti, 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok* Jurnal Tata Loka, Volume 5, Nomor 1, Januari, hal. 75-86

### Koran

Harian Umum Pelita, 31 Maret 2008, *Air Laut Pasang Disertai Angin Kencang Puluhan Rumah dan Tambak Ikan di Marunda Kebanjiran*.

### Dalam buku referensi (Ensiklopedia, kamus)

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya.2006. *Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan*  
 Soefaat et al. 1997. *Kamus Tata Ruang Edisi I*. Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum - Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.  
 Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka

## SKRIPSI

### Kolokium

Suryawan,A.Adib.2004.*Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Kawasan Alu-alun Surakarta*. **Skripsi** tidak diterbitkan, Pendidikan Program Sarjana Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.

## MAKALAH DALAM SEMINAR/LOKAKARYA/PERTEMUAN ILMIAH

Kirmanto, Djoko, 2001."Kebijakan dan Strategi Nasional Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh." Makalah disampaikan pada Semiloka Rencana Pencananangan Gerakan Nasional Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh, Palembang 20 – 21 Agustus 2001  
 Kartasmita, Ginanjar, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*, disampaikan pada pidato pengukuhan jabatan guru besar FIA, Unibraw, Malang.  
 Lasino, 2002. *Pengaruh Genangan terhadap Bangunan*, disajikan dalam seminar Dampak Kenaikan Muka Air Laut pada Kota-kota Pantai di Indonesia, Bandung 12-13 Maret 2002

## INTERNET

Hasan, Mustafa. 2000. *Teknik Sampling*. <http://home.unpar.ac.id> (5 Agustus 2008)  
 Slamet, Sutikno. 2008. *Teknik Pengumpulan Data*. <http://tesis-disertasi.blogspot.com/2008/04/studi-studipustaka.html>.(6 April 2008)

**BUKU DATA/LAPORAN**

*Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007*, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta  
*Kecamatan Cilincing dalam Angka Tahun 2007*. BPS Kotamadya Jakarta Utara, 2007  
*Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dalam Rangka Mempercepat Upaya  
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan di DKI Jakarta 2002-2007*. Jakarta, 2002  
*Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta 2003*. Badan Pemberdayaan  
Masyarakat Propinsi DKI Jakarta

## LAMPIRAN A : KUESIONER



### PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Semarang, Januari 2009

Kepada Yth.

Masyarakat Kelurahan Marunda Jakarta Utara

di

Tempat

Bersama ini saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara, meluangkan waktu sejenak diantara kesibukan yang sedang dijalankan untuk mengisi kuesioner yang telah disusun.

Kuesioner ini disusun dalam rangka pengumpulan data lapangan, sebagai bagian dari penelitian saya untuk menyusun tesis. Tesis ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana, Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang. Adapun identitas diri saya adalah sebagai berikut :

**Nama** : **S u t a m i**  
**NIM** : **L4D007038**  
**Alamat di Jakarta** : **Apron 5 B Lt.4 Nomor 403 Kemayoran, Jakarta Pusat**  
**Alamat di Semarang** : **Jl. Ngesrep Timur V Dalam II No.2 Semarang**  
**Judul Penelitian** : ***Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara***

Mohon pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner diisi secara lengkap, serta pengembalian kuesioner ini kepada saya, merupakan bantuan yang tak ternilai bagi penelitian ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

**S u t a m i**

## KUESIONER PENELITIAN

### PETUNJUK PENGISIAN :

1. Isi data diri Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan
2. Pada pertanyaan pilihan dalam kuesioner, diisi dengan memberikan tanda silang (×) pada jawaban yang telah disediakan.
3. Khusus pertanyaan yang memerlukan jawaban penjelasan, mohon dijawab pada kolom yang telah disiapkan

### DATA IDENTITAS RESPONDEN

Nama : .....

Alamat : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan terakhir : a. SD  
 b. SLTP  
 c. SLTA  
 d. Akademi (DI, DII, DIII)  
 e. Perguruan Tinggi

Pendapatan per bulan : a. Kurang dari Rp 1.000.000  
 b. Antara Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000  
 c. Lebih dari Rp 5.000.000

Lama bermukim di Kelurahan Marunda : .....

### DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

**Bentuk Partisipasi Masyarakat**

- 1. Apakah Bapak Ibu ikut berpartisipasi pada tahap perencanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu :
  - a. Ya
  - b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan, selanjutnya pertanyaan nomor 3)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

- 2. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/Ibu pada tahap perencanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu :
  - a. Aktif mengikuti pertemuan
  - b. Aktif menyampaikan usulan/saran
  - c. Terlibat dalam pengambilan keputusan

- 3. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu :
  - a. Ya
  - b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan, selanjutnya pertanyaan nomor 6)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

- 4. Apa bentuk partisipasi Bapak/Ibu pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu :
  - a. Tenaga
  - b. Uang
  - c. Material
  - d. Pikiran
  - e. Keahlian
  
- 5. Terkait pilihan pada pertanyaan nomor 4 (empat) di atas, mohon dijelaskan alasan Bapak/Ibu, kenapa memilih bentuk tersebut?

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

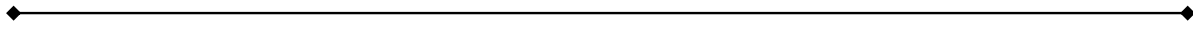
- 6. Apakah Bapak Ibu ikut berpartisipasi pada tahap pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu :
  - a. Ya
  - b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan, selanjutnya ke pertanyaan nomor 8)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

- 7. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/Ibu pada tahap pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu :
  - a. Melihat kesesuaian bentuk prasarana yang telah dibangun dengan rencana yang telah ditetapkan
  - b. Melihat daya guna (kemampuan yang mendatangkan hasil yang sebanyak-banyaknya) dari prasarana lingkungan yang telah dibangun

- c. Melihat hasil guna (sesuatu yang diadakan atau dibuat yang memberikan manfaat) dari prasarana lingkungan yang telah dibangun.

**Tingkat Partisipasi Masyarakat**



8. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah di undang oleh pemerintah untuk mendapatkan persetujuan tentang program tersebut :

- a. Ya
- b. Tidak (Jika tidak, langsung ke pertanyaan nomor 10)

9. Siapa yang mengundang Bapak/Ibu?

- a. Lurah
- b. Ketua RT
- c. Ketua RW
- d. Lainnya, mohon disebutkan.....

10. Apakah Bapak/Ibu selalu mendapat perlakuan yang sama dengan warga lain jika diundang untuk menghadiri rapat terkait dengan program ini?

- a. Ya
- b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

11. Pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan informasi dari pemerintah mengenai program ini tanpa pemberian kesempatan kepada Bapak/Ibu untuk bertanya atau memberikan saran untuk program ini?

- a. Ya
- b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

12. Darimana Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) :
- a. Media massa
  - b. Pamflet
  - c. Poster
  - d. Lainnya, mohon disebutkan.....

13. Pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah melakukan tanya jawab dengan pemerintah mengenai program ini?
- a. Ya
  - b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

14. Dimanakah tempat yang biasanya Bapak/Ibu gunakan dalam melakukan tanya jawab dengan pemerintah mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ini?
- a. Kantor Kelurahan
  - b. Rumah Ketua RW
  - c. Rumah Ketua RT
  - d. Rumah warga
  - e. Lainnya, mohon disebutkan.....

15. Pada saat pertemuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dengan pemerintah di lingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah memberikan saran-saran mengenai program ini?

- a. Ya
- b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

16. Apa saran-saran dari Bapak/Ibu pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu?

- a. Saran pada tahap perencanaan :.....  
.....  
.....
- b. Saran pada tahap pelaksanaan :.....  
.....  
.....
- c. Saran pada tahap pengawasan :.....  
.....  
.....

17. Apakah saran-saran dari Bapak/Ibu diterapkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ini?

- a. Ya
- b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

18. Pada saat pertemuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dengan pemerintah di lingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah melakukan negosiasi (tawar-menawar) mengenai program ini?

- a. Ya
- b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

19. Selain negosiasi (tawar-menawar), pernahkah Bapak/Ibu diberi limpahan kewenangan dari pemerintah untuk membuat keputusan dominan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu?

- a. Ya
- b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--

20. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di lingkungan Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah diberi kekuasaan penuh oleh pemerintah untuk melaksanakan program ini?

- a. Ya
- b. Tidak (Jika tidak, mohon dijelaskan)

Mengapa?..... ..... ..... .....
--